STUDI KOMPARATIF KONSEP KHILAFAH AHMADIYAH DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA: ANALISIS KUASA MICHEL FOUCAULT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program
Studi Aqidah dan Filsafat Islam

Oleh:

AHMAD AHKAMUL ARIF
NIM: E91217060

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ahkamul Arif

NIM : E01217060

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 26 April 2022
Saya yang Menyatakan

Ahmad Ahkamul Arif
E91217060

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “Studi Komparatif Konsep Khilafah Ahmadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia: Analisis Kuasa Michel Foucault” yang ditulis oleh Ahmad Ahkamul Arif ini telah disetujui pada 20 Juni 2022

Surabaya, 20 Juni 2022
Pembimbing,

Dr. H. Kasno, M.Ag
NIP: 1959121011986031006

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Studi Komparatif Konsep Khilafah Ahmadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia: Analisis Kuasa Michel Foucault" yang ditulis oleh Ahmad Ahkamul Arif ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 14 Juli 2022

Tim Penguji:

1. Dr. H. Kasno, M.Ag : .....
2. Dr. Anas Amin Alamsyah, M.Ag : .....
3. Dr. Tasmuji, M.Ag : .....
4. Fikri Mahzumi, M.Fil.I, S.Hum : .....

Surabaya, 21 Juli 2022
Dekan

Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D
NIP. 197008132005011003

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Ahkamul Arif
NIM : E91217060
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Aqidah dan Filsafat Islam
E-mail address : ahkamalarif98@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Studi Komparatif Konsep Khilafah Ahmadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia : Analisis Kuasa Michel Foucault

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juli 2022

Penulis

(Ahmad Ahkamul Arif)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Judul : Studi Komparatif Konsep Khilafah Ahmadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia: Analisis Kuasa Michel Foucault

Nama : Ahmad Ahkamul Arif

Pembimbing : Dr. H. Kasno, M.Ag

Kata Kunci : *Khilafah Ahmadiyah, Khilafah HTI, Michel Foucault*

Penelitian ini membahas mengenai konsep *khilafah* yang diusung oleh Ahmadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ahmadiyah menganggap bahwa aspek spiritualitas menjadi poin penting dalam penerapan dari *khilafah* tersebut, sementara itu HTI dalam konsep *khilafahnya* lebih cenderung kepada sistem pemerintahan yang mengharuskannya untuk menerapkan aspek keislaman secara ketat. Beberapa rumusan masalah sudah ditentukan dalam penelitian ini, diantaranya adalah bagaimana tipologi *khilafah* Ahmadiyah dan HTI, serta bagaimanakah perbadingan konsep dari kedua organisasi tersebut setelah dianalisis. Penelitian ini nantinya akan menggunakan metode kualitatif-deskriptif yang disertai dengan pisau analisis dari konsep kuasa Michel Foucault. Hasil dari penelitian ini sendiri menyatakan bahwa terdapat beberapa perbandingan penting yang terdapat pada konsep *khilafah* antara Ahmadiyah dan HTI, seperti kontrol aktivitas yang dilakukan oleh Ahmadiyah cenderung pada aspek batiniah, sedangkan HTI pada aspek lahiriah. Seni penyebarannya sendiri juga terdapat perbedaan, Ahmadiyah lebih kepada aspek sosial dan HTI pada internal keagamaan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN i
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN SKRIPSI iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang 1
B Identifikasi dan Batasan Masalah 5
C Rumusan Masalah 6
D Tujuan Penelitian 6
E Manfaat Penelitian 6
F Kajian Terdahulu 7
G Metode Penelitian 10
H Sistematika Pembahasan 14
BAB II GENEALOGI KHILAFAH DAN KONSEP KEKUASAAN MICHEL FOUCAULT 15
A Genealogi Khilafah 15
B Selayang Pandang Michel Foucault 21
C Konsep Pemikiran Michel Foucault 23
BAB III KONSEP *KHILAFAH* DALAM PANDANGAN HTI DAN AHMADIYAH 37
A Konsep *Khilafah* HTI 37
B Konsep *Khilafah* Ahmadiyah 45
BAB IV KOMPARASI KONSEP KHILAFAH HTI DAN AHMADIYAH 54
A Analisis Kekuasaan Terhadap Konsep Khilafah HTI 54

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B Analisis Kekuasaan Terhadap Konsep Khilafah Ahmadiyah 61
C Komparasi Kuasa Konsep Khilafah HTI dan Ahmadiyah 67
BAB V PENUTUP 69
A Kesimpulan 69
B Saran 70
DAFTAR RUJUKAN 71

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Kepemimpinan merupakan suatu problematika yang sangat krusial dalam kehidupan ini, bahkan eksistensinya sangat diperlukan dalam suatu sistem kenegaraan terhadap suatu bangsa. Pemimpin diharapkan dapat mengambil suatu keputusan maupun kebijakan yang baik dan terarah atas instruksi yang telah tersusun rapid an baik, sehingga fungsi kepemimpinan dalam hal ini harus berdasarkan lebih mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Seorang pemimpin harus bisa mengayomi dan melayani, bukan sebaliknya. Begitupun dengan politik, dimana saat ini banyak elit-elit politik yang hanya menampakkan layanan tersebut ketika sedang berkampanye saja, setelah terpilih seringkali tidak sesuai dengan yang dikampanyekan.

Agama dan politik pada dasarnya tidak bisa dipisahkan, secara struktural juga diikat oleh suatu sistem keagamaan yang formal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penguatan suatu konsep *revivalisme* agama dalam dunia politik yang mematahkan pendapat yang menyatakan bahwa pembangunan sistem politik itu dilandasi dengan adanya proses rasionalisasi kekuasaan. Perbincangan mengenai hubungan antara agama dengan politik memang selalu menarik untuk dibahas. Tarik menarik antara keduanya menghasilkan suatu ketegangan dinamik yang tidak jarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan suatu benturan. Bagi penganut aliran mekanik-holistik, Islam dianggap bukan hanya sebagai suatu dogma-dogma agama yang bersifat kaku, akan tetapi juga dipahami sebagai sistem politik, pandangan hidup dan penafsiran sejarah. Islam juga dipahami mempunyai suatu karakter atau ciri khas *omnipresent* atau selalu hadir dalam berbagai macam kondisi dan situasi.[1]

Persoalan mengenai relasi agama dan politik dalam diskursus dewasa ini masih belum menemukan titik terang. Terlebih lagi Islam menurut para penganutnya dinilai memiliki pesona sebagai suatu agama yang *syamil, kamil* dan *mutakamil.* Hingga muncul suatu pendapat yang mencoba untuk menengahi pandangan dari ekstemis dengan menyatakan bahwa agama merupakan persoalan pribadi, sementara itu ruang publik harus bersifat skular –terpisah dari aspek agama-. Oleh sebab itu, agama seharusnya berposisi secara netral dalam ruang lingkup politik dan terhindar dari berbagai macam kepentingan suatu kelompok manapun.

Kemudian dewasa ini muncullah suatu konsep politik yang dianggap sebagai solusi dari berbagai macam masalah yang tengah menimpa suatu negara maupun sistem pemerintahan, yakni khilafah. Khilafah sendiri sebagai suatu sistem pemerintahan di dunia Islam merupakan suatu bagian dari sejarah kebudayaan Islam, hal tersebut berawal setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan berbagai mecam kepemimpinan yang terkait

[1] Ahmad Hudori, "Khilafah Islamiyah Perspektif Ahmadiyah", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 1.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan keagamaan diserahkan atau digantikan oleh para sahabat yang sudah ditunjuk dan dipercaya sebelumnya, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sistem khilafah tersebut oleh beberapa kelompok masih dipertahankan dengan tidak merubah model dan cara karena telah terbukti membawa Islam kepada masa jayanya. Akan tetapi menurut kelompok lain, sistem pemerintahan khilafah tersebut merupakan suatu sistem yang tidak bisa digunakan secara global, sebab hanya berlaku pada waktu dan tempat tertentu yang pernah ada pada masa Islam awal sepeninggal Nabi. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan mendesak umat Islam terhadap berbagai macam problematika yang harus mendapatkan suatu jawaban secara cepat pada waktu itu, sehingga sistem khilafah pada masa tersebut eksistensinya dianggap mempunyai dampak dan relevansi yang signifikan.

Akan tetapi seiring perkembangan zaman, Islam dituntut untuk lebih responsible dengan tidak menghilangkan ajaran yang sudah ada sebelumnya. Menghadapi isu tersebut, *Ahmadiyah* hadir dengan melakukan reinterpretasi terhadap beberapa ajaran agama dalam menghadapi berbagai macam masalah yang sangat kompleks terhadap agama, termasuk salah satunya adalah sistem khilafah. Khilafah yang dilayangkan oleh *Ahmadiyah* berbeda dengan konsep khilafah yang digagas oleh kelompok Islam lainnya, seperti *ISIS*, *HTI* dan *al-Qaeda*. Kelompok tersebut memiliki pemahaman bahwa khilafah merupakan perjuangan dalam bidang politik, dan menolak sistem demokrasi yang dianggap sebagai suatu sistem yang tidak memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur-unsur Islam di dalamnya. Perbedaan tersebut terletak pada metode pemahaman mengenai ajaran agama, *Ahmadiyah* meyakini khilafah tidak berhubungan dengan problematika pemerintahan atau tidak bersifat politik, akan tetapi hanya berafiliasi pada wilayah spiritual saja.[2]

Konsep khilafah yang diusung oleh *Ahmadiyah* tersebut berbeda dengan apa yang dipahami oleh kelompok *Hizbut Tahrir Indonesia* atau *HTI*. *HTI* menganggap bahwa romantisme mengenai masa-masa keemasan Islam yang terjadi pada masa lalu tersebut menjadi sebuah tolak ukur dalam mencetuskan suatu sistem kenegaraan dengan spekulasi bahwa berbagai macam bentuk maupun konsep bernegara yang telah dilayangkan oleh dunia saat ini merupakan sistem yang buruk atau tidak dapat memberi manfaat atau kebaikan terhadap suatu negara tersebut, terlebih lagi bagi kelangsungan hidup manusia. Pada akhirnya kelompok tersebut menyimpulkan bahwa khilafah merupakan suatu pilihan yang tak tergantikan.[3]

HTI berusaha mengajak seluruh umat muslim untuk kembali hidup secara alami dengan menggunakan sistem *dawlah khilafah* yang dipimpin oleh seorah khalifah yang diangkat serta dibai'at oleh umat muslim untuk ditaati agar menjalankan suatu pemerintahan dengan berdasarkan al-Qur'an dan sunnah, serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Serta seluruh kegiatan dari masyarakat Islam

[2] Muhammad Muhtador, "Khilafah Islamiyah Perspektif Ahmadiyah: Sebuah Gerakan Spiritual Keagamaan", *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, Vol. 02, No. 01 (2016), 81.
[3] Eko Nani Fitriono dan Suhono, "Wacana Negara Islam: Kajian Kritis Konstruksi Pemikiran Khilafah ala Hizbut Tahrir", *Ri'ayah,* Vol. 02, No. 01 (2017), 45.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut diatur sesuai dengan hukum-hukum syara', dimana pandangan yang dipedomani oleh halal dan haram.[4]

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan penulis di atas, tentu sangat menarik untuk membandingkan kedua konsep khilafah yang dilayangkan kedua kelompok Islam tersebut. Pembahasan tersebut nantinya akan menggunakan pendekatan dari teori kuasa Michel Foucault, dimana menurutnya suatu kuasa atau kekuasaan tersebut bisa dijalankan dan difungsikan pada suatu aspek tertentu[5] –dalam hal ini adalah konsep kepemimpinan khilafah dari *Ahmadiyah* dan *HTI*. Maka penulis ingin menjelaskan perbedaan aspek-aspek kuasa yang terdapat dalam konsep kepemimpinan kedua kelompok tersebut.

B Identifikasi dan Batasan Masalah

Berawal dari paparan latar belakang di atas dapat dicermati beberapa inti problematika yang akan menjadi titik pijak dalam penelitian skripsi ini. Oleh karena itu perlu adanya suatu identifikasi terhadap permasalahan tersebut yang kemudian ditentukan batasan-batasan permasalahan yang akan menjadi fokus dari penelitian ini yang diantaranya:

1. Pentingnya memahami berbagai macam konsep *khilafah* secara mendalam.
2. Pentingnya memahami konsep khilafah dari *HTI* dan *Ahmadiyah.*

[4] *Ibid.*, 46.
[5] K. Bertens, *Sejarah Filsafat Kontemporer Prancis Jilid II* (Jakarta: Gramedia, 2003) 305-306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tipologi khilafah dari kelompok *Ahmadiyah* dan *HTI*?
2. Bagaimanakah perbandingan konsep khilafah dari *Ahmadiyah* dan *HTI* dalam analisis teori kuasa Michel Foucault?

D Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk:

1. Menjelaskan mengenai tipologi khilafah dari kelompok *Ahmadiyah* dan *HTI*.
2. Menjelaskan mengenai analisis perbandingan konsep khilafah dari *Ahmadiyah* dan *HTI* dalam sudut pandang teori kuasa Michel Foucault.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

E Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat baik dalam aspek teoritis maupun dalam aspek implementasinya. Manfaat penelitian ini secara keilmuan teoritis dengan tema konsep kepemimpinan yang diusung oleh *HTI* dan *Ahmadiyah* tersebut adalah sebagai sumbangsih intelektualitas akademis dalam bidang keilmuan filsafat, agama, dan politik. Sementara itu dari aspek fungsional praktis dalam suatu implementasi, penelitian ini bertujuan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi beberapa pihak yang memiliki keterkaitan terhadap tema tersebut agar tidak salah memahami dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa menimbulkan salah paham nantinya. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi suatu acuan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan erat dengan tema tersebut.

F Kajian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Penerbit	Temuan
1.	Muhammad Muhtador	*Khilafah Islamiyah Perspektif Ahmadiyah: Sebuah Gerakan Spiritual Keagamaan*	Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf/ Sinta 3	*Ahmadiyah* meyakini bahwa khalifah merupakan gelar yang datang dari Allah SWT dalam meneruskan perjuangan Nabi. Sedangkan sebagai gerakan keagamaan, *Ahmadiyah* mempunyai tujuan untuk menyebarkan agama ke seluruh dunia dengan didukung gerakan spiritual yang bersifat solidaritas, keilmuan dan sosio-ekonomi.
2.	Muzayyin Ahyar	*Ahmadiyah Dalam Labirin Syariah dan Nasionalisme Ketuhanan di Indonesia*	Mazahid: Jurnal Pemikiran Hukum Islam/ Sinta 2	Penelitian ini menjelaskan bahwa aksi kekerasan kepada jemaat *Ahmadiyah* sejak dulu tidak hanya dilakukan oleh sebagian oknum masyarakat intoleran, tetapi juga

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				diakomodir oleh pemerintah sebagai konsensus umum mengenai pandangan ketuhanan *orthodox* di Indonesia. Selain itu, fenomena intoleran juga menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu dipertanyakan dalam sikap nasionalisne –antara memihak nasionalisme sekuler di satu sisi dan tetap mengimani nasionalisme religius pada sisi lainnya-.
3.	Ainur Rofiq Al-Amin	*Kritik Pemiikiran Khalifah Hzbut Tahrir yang Autokratik*	Teosof: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam/ Sinta 2	Penelitian ini menemukan bahwa model pemillihan, pengangkatan, pemakzulan dan kekuasaan khalifah disertai ketaatannya mengarah pada pemerintahan yang autokratis
4.	Moh. Fiqiih Frdaus	*Memaknai Paradigma Integrasi Twin Tower UINSA: Studi Kritis Dalam*	Skripsi	Penelitian ini berhasil menemukan bahwa wujud nyata dalam wacana paradigma integrasi Twin Tower adalah dengan adanya berbagai macam keterkaitan di dalamnya, seperti antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Pandangan Michel Focault		fakultas dengan prodi. Terdapat suatu representasi layaknya suatu sistem yang terdapat dalam pondok pesantren mahasiswa, ma'had, dan intensif –bahasa Arab dan Inggris- yang merupakan suatu bentuk pelatihan mengenai pengembangan bahasa yang bertujuan agar mahasiswa lebih berkembang. Uraian tersebut membuat kuasa sendiri tidak lagi diartikan sebagai suatu hal yang mengikat atau menekan suatu objek tertentu.

Terdapat beberapa penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan yang berkaitan dengan tema *HTI* maupun *Ahmadiyah*, baik dalam bentuk jurnal maupun berupa tugas akhir –seperti skripsi, thesis dan disertasi-. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat diketahui bahwa belum ada yang membahas tema tersebut dengan membandingan kedua konsep tersebut beserta menggunakan alat analisis berupa teori konsep kekuasaan dari Michel Foucault.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G Metode Penelitian

Pada sub bab ini akan menjelaskan mengenai beberapa hal terkait metodologi penelitian yang akan dipergunakan dalam mengamati dan menganalisa rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan cara menganalisa dan menjelaskan berupa teks naratif dan bukan berupa data statistik. Peneliti disini akan melakukan penelitian kepustakaan atau *library research*, dimana penelitian tersebut sendiri adalah jenis penelitian dengan mengumpulkan berbagai macam data yang berupa kepustakaan yang kemudian akan menjadi acuan dalam pembahasan yang telah dituangkan peneliti.[6] Melihat dari berbagai macam isi dari berbagai macam bacaan seperti buku, jurnal, majalah, Koran, dan berbagai kumpulan dokumen lain yang telah didapat agar bisa menjadi rujukan dan dimasukkan dalam penelitia sebagai penunjang dalam penelitian ini.[7] Penulis akan berfokus pada data-data yang bersifat deskriptif yang berbentuk tulisan, khususnya mengenai konsep kepemimpinan khilafah dari kelompok *Ahmadiyah* dan *HTI*, serta mengenai konsep kuasa dari Michel Foucault.

2. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

[6] Mahmud, *Metode Penelitiian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31.
[7] Sutrisno Hadi, *Metodollogi Research I* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 9.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah studi literatur dengan berbagai macam dokumen atau buku literatur yang terkait focus penelitian sebagai bahan pembanding atau mendalami objek penelitian.

Sumber yang akan diambil dari penelitian skripsi ini bisa digolongkan menjadi dua, yakni sumber utama –primer- dan sumber pendukung –sekunder-. Sumber utama sendiri merupakan suatu hasil dari data yang telah ditemukan secara langsung yang kemudian untuk digunakan sebagai sumber informasi yang berhubungan erat dengan penelitian yang juga paling penting dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian nantinya.[8] Penelitian ini mengambil beberapa data pustaka,, seperti dari buku maupun manuskrip lainnya yang berkaitan erat mengenai konsep kepemimpinan khilafah dari kelompok *Ahmadiyah* dan *HTI* sebagai sumber primer, seperti buku Membongkar Proyek Khilafah Ala HTI, Konstruksi Sistem Khilafah HTI dan Proyek Khilafah HTI Perspektif Kritis.

Sedangkan sumber pendukung –sekunder- adalah data tambahan yang didapat dari sumber tidak langsung, sehingga dapat dijadikan sebagai kumpulan dalam penelitian. Dalam hal ini, sumber data yang akan peneliti gunakan adalah berupa dokumen atau manuskrip lain yang berkaitan erat dengan alat analisis berupa konsep kuasa dari Michel Foucault maupun datar-data lain yang terkait dengan tema pembahasan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

[8] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitiian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa metode dokumentasi dengan menggunakan sumber-sumber *non-human source of information*. Metode ini digunakan sebab memiliki beberapa keunggulan dalam pelaksanaannya, seperti efisiensi dari segi waktu, tenaga dan biaya operasional. Tahap awal dari metode ini adalah dengan cara observasi atau memilah data-data yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya dilakukan pengambilan intisari dari data-data tersebut yang kemudian dijelaskan kembali secara lebih ringkas namun tetap terhubung dengan esensi yang telah diambil.[9]

4. Teori

Konsep kekuasaan Foucault pada dasarnya terinspirasi dari Niesztche. Kekuasaan sendiri adalah berbagai macam hal yang dibuat secara khusus oleh suatu sistem –pemerintahan- yang berutujuan dapat mengikat suatu objek –warga negara- agar mematuhi berbagai macam aturan tersebut. Akan tetapi, menurut Foucault kekuasaan tersebut tidak hanya dalam bentuk suatu sistem pemerintahan atau suatu negara saja yang mengatur atau menguasai, akan tetapi kekuasaan tersebut bisa diperoleh dan terdapat dimana-mana karena kekuasaan adalah suatu sinkronisasi dari relasi dan dimensi. Setiap terdapat suatu relasi, maka disana ada suatu kekuasaan yang bekerja.[10]

[9] J. Dimyati, *Metode Penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
[10] Michel Focault, *Power/Knowledge: Wacna Kuasa/Pengetahuan* (Yogyakarta: Bintang Budaya, 2002), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu kuasa itu terdapat dalam berbagai macam hal, dan kekuasaan merupakan suatu strategi yang sudah terjadi serta sedang terjadi dimanapun dan suatu kekuasaan yang sedang berlangsung tersebut terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan tersebut tidak datang dari luar, akan tetapi kekuasaan tersebut yang menentukan suatu susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari dalam dan yeng membuat kemungkinan berbagai macam hal bisa terjadi.[11]

Konsep kekuasaan yang dilayangkan oleh Michel Foucault memang terindikasi memiliki banyak perbedaan dengan konsep pemikiran yang digagas oleh Karl Marx dan Max Weber. Foucault berpendapat bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang ada dan yang terdapat dalam suatu kelompok kecil di masyarakat yang bisa hilang kapan saja. Kekuasaan juga tidak dioperasikan secara negatif, seperti halnya dengan tindakan kekerasan dan mengancam yang dilakukan oleh pemilik kekuasaan tersebut –seperti suatu lembaga pemerintahan ataupun organisasi tertentu-. Kekuasaan juga tidak seperti siapa yang berada di puncak tangga perekonomian atau ideologi seperti yang dinyatakan oleh Karl Marx, dan juga bukan karena suatu charisma yang dimiliki seseorang. Kekuasaan bagi Foucault tidak dinilai sebagai suatu hal yang negatif, akan tetapi dilihat dan difahami sebagai sesuatu yang positif dan produktif.[12]

[11] Abdullah Khozin Afandi, "Konsep Kekuasaan Michel Foucault", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam,* Vol. 02, No. 01 (Juni 2012), 140.
[12] Umar Kamahi, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik", *Jurnal al-Khitabah,* Vol.03, No. 01 (Juni 2017), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H Sistematika Pembahasan

Rancangan penelitian ini akan disusun secara terstruktur dan sistematis dalam bentuk bab sebagaimana berikut susunan pembahasannya:

Bab Pertama menjadi bab yang fokus menjelaskan tentang sistematika penulisan akan penelitian ini secara keseluruhan, dengan tujuan agar penulisan penelitian dapat runtut dan sistematis.

Bab kedua nantinya akan memaparkan data mengenai konsep dari berbagai macam bentuk kepemimpinan

Bab ketiga akan menjelaskan mengenai *Ahmadiyah* dan *HTI.*

Bab keempat menjelaskan mengenai analisis konsep khilafah dari *Ahmadiyah* dan *HTI* dengan menggunakan teori kuasa dari Michel Foucault.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan terkait komparasi dari kedua konsep *khilafah* yang sudah dianalisis dan saran sebagai catatan akhir dari penelitian yang telah dikakukan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

GENEALOGI KHILAFAH DAN KONSEP KEKUASAAN MICHEL FOUCAULT

A Genealogi Khilafah

1. Pengertian *Khilafah*

Kata *Khilafah* memiliki kata dasar yaitu *khalafa* yang artinya sebagai mengganti atau menempati tempatnya. Maksudnya, kedudukan yang telah ditempati orang lama akan digantikan dengan orang baru. Sedangkan istilah bagi orang baru yang menggantikan orang lama disebut *khalīfah* yang berarti wakil.[1] Dengan demikian istilah *Khilafah* menunjukkan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang yang disebut *khalifah.*

Di dalam pembahasan fikih politik, istilah *Khilafah* sulit dilepaskan dari konteks *imamah*. *Khilafah* dan *imamah* sebenarnya memiliki kesamaan arti yakni kepemimpinan tertinggi dalam suatu wilayah atau negara Islam. Akan tetapi istilah *Khilafah* lebih sering dipergunakan untuk menyebut pemimpin oleh kelompok sunni, sedangkan *imamah* lebih sering pergunakan untuk menyebut pemimpin oleh kalangan syi'ah.[2]

[1] Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, (Malang: Indonesiatera, 2001), 30.
[22] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 149.

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Baidhawi mengartikan *Khilafah* sebagai keadaan di mana fungsi Nabi Muhammad SAW digantikan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab melaksanakan undang-undang sesuai apa yang tercantum dalam syariat Islam dan ia telah siap untuk melestarikan tuntutan yang telah disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam.[3] Dari beberapa penjelasan di atas, maka bisa disimpulkan *Khilafah* adalah sistem pemerintahan mengatur secara universal kebutuhan-kebutuhan bernegara dan bermasyarakat sesuai dengan syariat Islam.

2. Dari Khulafaur Rasyidin hingga Turki Utsmani

Menurut intelektual Islam Indonesia yakni Emha Ainun Nadjib, *Khilafah* disinyalir sudah terjadi ketika Allah pertama kali menghendaki suatu hal yang ada di alam semesta. Ia mengartikan *Khilafah* sebagai tata kelola atau sistem yang wajib dilaksanakan oleh manusia demi memantaskan ketaqwaan dirinya kepada Allah.[4] Jadi, *Khilafah* bisa jadi berbentuk demokrasi, monarki, kekaisaran, aristokrasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan data populer yang sering dikutip dalam penelitian terdahulu, kata *Khilafah* mulai dikenal pasca Nabi Muhammad SAW meninggal yaitu waktu kepemimpinan Abu Bakar as-Shidiq. Penunjukkan Abu Bakar sebagai *khalīfah* menggantikan Nabi Muhammad SAW merupakan kondisi yang rumit bagi umat Islam kala itu. Dikarenakan, dalam posisi ini bukan hanya

[3] Etiek Dwi Kurniawati, "*Khilafah* Islam Versus Pancasila: Studi Tentang Perdebatan Ideologi di Kalangan Generasi Milenial Melalui Media Sosial" (Skripsi—Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2019), 21.

[4] Helmi Mustofa, "*Khilafah* Alamiah dan *Khilafah* dalam Batas Kemampuan", dalam https://www.caknun.com/2017/khilafah-alamiah-dan-khilafah-dalam-batas-kemampuan/ diakses pada tanggal 28-02-2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekedar mengganti *khalīfah*, namun juga sebagai contoh yang sanggup mereplika sifat dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Bahkan kerumitan dalam proses pencarian dan pergantian *khalīfah* tersebut membuat pemakaman Nabi sempat dikesampingkan oleh umat dan bagi para Sahabat.

Pasca Nabi Muhammad SAW wafat, sama sekali tidak ada sepatah kata pun dari ucapannya tentang siapa *khalīfah* yang akan menggatikannya. Karena itulah, kaum Muslim bermusyawarah menentukan problematika pelik tersebut. Maka sebelum Nabi Muhammad SAW dikebumikan jasadnya, beberapa tokoh Anshar dan Muhajirin melakukan pertemuan guna memusyawarahkan mengenai siapa yang layak dipilih menjadi seorang *khalīfah*.[5]

Kubu Anshar dan Muhajirin sama-sama memunculkan kandidatnya masing-masing sehingga dalam musyawarah tersebut terjadilah perdebatan panas. Tidak lama kemudian, perdebatan itu sampai pada telinga para sahabat, antara lain yaitu Umar bin Khattab, Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Ketika tiba di lokasi musyawarah, dihadapannya sedang terjadi perdebatan yang cukup panas, bahkan orang-orang yang berdebat hampir tidak kuasa menampung ego amarahnya.[6]

Melihat kondisi umat Islam pada kejadian itu semakin memanas, Umar bin Khatab tidak tinggal diam. Ia mencalonkan nama Abu Bakar sebagai calon *khalīfah* selanjutnya sebab Abu Bakar sendiri memiliki rasa loyalitas serta keberanian yang kuat. Ia menjadi garda terdepan bagi Nabi Muhammad SAW

[5] Early Chalipate, *Khulafaur Rasyidin*, Terj. Maulana Muhammad Ali, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2013), 15.
[6] Ely Zainudin, ”Peradaban Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin”, *Jurnal Intelegensia*, Vol. 03, No.1 (2015), 52.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan umat Islam. Pada akhirnya, kaum Anshar dan kaum Muhajirin memilih satu suara dengan mengangkat Abu Bakar sebagai *khalīfah* pengganti Nabi Muhammad SAW. Proses pembaiatan Abu Bakar dipimpin oleh Basyir bin Saad beserta pengikutnya yang ikut serta dalam musyawarah tersebut.

Beberapa tahun berselang, diangkatlah Umar bin Khattab sebagai *khalifah* pengganti Abu Bakar. Proses pemilihan Umar bin Khattab sebagai *khalīfah* selanjutnya tidak lepas dari racikan tangan Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar dalam keadaan sakit keras yang membuat dirinya tidak bisa lagi memimpin serta sudah mempunyai firasat akan segera tiba ajalnya, ia secara diam-diam melakukan diskusi kecil mengenai penggantinya bersama kepada sahabat dan tokoh-tokoh yang ia percayai selama menjabat menjadi *khalifah*. Setelah itu, Abu Bakar sempat berwasiat untuk bahwa jabatan *khalifah* selanjutnya kepada akan diduduki oleh Umar bin Khattab. Pesan ini ditulis langsung oleh Utsman bin Affan.

Setelah Umar bin Khatab meninggal, para sahabat mengadakan musyawarah kembali yang digelar di rumah Aisyah RA untuk menunjuk siapa pengganti yang pantas untuk mendapati posisi kursi *khalīfah* pasca Umar bin Khatab wafat.[7] Maka di mulailah musywarah tersebut yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf.

Tidak hanya itu, perjuangan Abdurrahman bin Auf dapat dikatakan totalitas bagi kesejahteraan umat dikarenakan selama tiga hari ia menyusuri jalan dengan maksud meminta tanggapan kepada semua lapisan masyarakat tentang siapa yang cocok menjadi *khalīfah* pengganti Umar bin Khatab. Dari berbagai macam perspektif, ternyata nama Usman bin Affan banyak disebut

[7] Chalipate, *Khulafaur Rasyidin*, 95.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dianggap pantas oleh umat Islam sebagai *Khilafah* yang baru penggati Umar bin Khattab. Maka, pembaitan Usman bin Affan sebagai *Khilafah* berlangsung.[8]

Di akhir masa hidupnya, Usman bin Affan mengalami hal yang sama dengan Umar bin Khatab karena ia meninggal dibunuh oleh musuh dari kaum muslimin.[9] Dengan keadaan mendesak seperti ini, kaum Anshar dan kaum Muhajirin berjabat tangan untuk bersama-sama meminta kepada Ali bin Abi Thalib menjadi *khalīfah* penerus. Menurut mereka tidak ada sosok yang pintar dan melampaui keilmuan, ketaqwaan, kehebatan Ali karena itulah umat meminta Ali sebagai *khalīfah*. Pada awalnya Ali merasa tidak pantas menjadi *khalifah*, namun karena permintaan tersebut terus menguat dari berbagai kalangan umat Islam kala itu mengakibatkan tidak ada pilihan lain bagi Ali selain menyetujui permintaan umat.

Setelah Ali wafat, terbetuklah Dinasti Umayyah. Dinasti ini berdiri kurang lebih selama 90 tahun dan memposisikan Damaskus sebagai Ibu kota negara. Ada beberapa tokoh yang pernah mencoba menduduki kursi *khalīfah* di dinasti ini antara lain Muawiyyah, Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz yang kerap disebut Umar II karena merupakan salah satu *khalīfah* yang dianggap pro dengan masyarakat melalui kebijakan-kebijakannya yang adil dan tepat sehingga pada saat ia berkuasa dapat dikatakan zaman keemasan Dinasti Umayyah. Dan ada pula al-Walid dan Hasyim Ibn abdul Malik.[10]

[8] Ali Muhammad Ash-shalabi, *Biografi Utsman bin Affan*, Terj. Masturi Irham dan Malik Supar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 95.
[9] *Ibid*.
[10] Ahkmad Saufi dan Hasmi Fadiillah, *Sejarah Peradaban Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 125.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa tahun berselang Dinasti Abbasiyah berdiri dengan latar belakang telah mengalahkan Dinasti Umayyah dan menguasai semua wilayahnya kecuali Andalusia. Berdiri cukup lama kurang lebih sampai tiga abad. Dinasti Abbasiyah melangsungkan kepemimpinan gaya Islam yang baik dengan mengedepankan perkembangan intelektual dalam bidang apapun dan budaya Timur Tengah.[11] Namun seiring berjalannya waktu, ketika bangsa non-Arab khususnya Turki dan kemudian diikuti bangsa Mameluk dari Mesir mulai melepaskan diri dari kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Meskipun dua bangsa tersebut keluar dari pemerintahan Dinasti Abbasiyah, keKhilafahan tetap berdiri sebagai simbol persatuan umat Islam.

Sampailah pada gen *Khilafah* yang tercatat dalam sejarah yakni pada Dinasti Utsmaniyyah. Dinasti Utsmaniyyah berdiri dari tahun 1299 sampai tahun 1924 M. Dinasti ini termasuk memiliki periode terpanjang dari rentang sejarah peradaban Islam. Banyak problematika yang terjadi pada Dinasti Utsmaniyyah salah satunya pada masa kepemimpinan Abdulhamid I, mengalami konflik dengan Dinasti Kristen Rusia yang mengakibatkan umat Islam tertekanan dari segala sisi.[12] Abdulhamid I tidak tinggal diam, ia mengambil keputusan membuat perjanjian damai dengan Dinasti Kristen Rusia. Pada tahun 1880 ketika Abdulhamid II menjabat sebagai khalīfah, ia dengan keberaniannya menentang keras dan melawan Rusia (khususnya bangsa Eropa) yang mulai memberlangsungkan praktek kolonialisme. Dinasti Utsmaniyyah mengalami kehancuran tepatnya pada tanggal 23 Maret 1924

[11] *Ibid.*, 213.
[12] *Ibid.*, 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disebabkan oleh konflik antara kaum nasionalis dan agamis serta keadaan ekonomi yang semakin kacau.

B Selayang Pandang Michel Foucault

Michel Foucault lahir dengan nama lengkap Paul-Michel Foucault dari keluarga yang bekerja pada bidang medis, ayahnya bernama Pual Michel Foucault dan ibunya bernama Anne Malapert. Foucault lahir di daerah Pioters yang merupakan suatu wilayah di negara Perancis pada 15 Oktober 1926. Foucault bersama kedua saudara kandungnya yang bernama Francine dan Denys semasa kecil kerap diajarkan oleh keluarganya cara membantu berbagai macam orang lain terkait dunia medis. Akan tetapi Foucault dewasa lebih tertarik pada dunia humaniora -seperti filsafat dan psikologi-, namun ayahnya lebih setuju jika Foucault menempuh perguruan tingginya di bidang kedokteran.[13]

Pada tahun 1945 Foucault akhirnya memutuskan untuk menuruti keinginan ayahnya untuk kuliah di fakultas kedokteran di *Universitas Ecole Normale Superiur* yang berada di Perancis. Bidang ilmu kedokteran dan medis yang diambil Foucault adalah psikopatogi yang berkaitan erat dengan orang gila, dimana Foucault dituntut untuk menganalisa berbagai macam fenomena atau tingkah laku yang terjadi pada pasien tersebut.[14] Pada masa akhir kuliahnya di fakultas kedokteran, Foucault mengambil kuliah lain

[13] Lechte John, *50 Filsuf Kontemporer dari Strukturalisme Sampai Postmodernitas,* terj. A. Gunawan Admiranto (Yogyakarta:, Kanisius, 2001), 83.
[14] *Ibid.,* 90.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada fakultas humaniora dan sosial yang merupakan keinginannya sebelum menempuh perguruan tinggi. Ketertarikan Foucault terhadap dunia pemikiran yang membuatnya masuk pada fakultas humaniora dan sosial tersebut, pada fakultas tersebut pula Foucault mendapatakan banyak perdebatan yang nilai kebenarannya masih dipertanyakan. Oleh sebab itu, pada tahun 1951 Focault bergabung pada partai komunis dan ditunjuk sebagai ketua orasi dalam perhimpunan komunis Perancis, dan pada organisasi tersebut pula pemikiran kritis Foucault sangat berkembang pesat.[15]

Beberapa tahun berselang, Foucault kemudian mendapat tawaran untuk mengajar di Universitas Uppsala yang terdapat di Swedia. Selain aktif di Partai Komunis Perancis, Foucault juga turut serta dalam *Groupe d'Information sur les Prison* yang ditujukan untuk mengumpulkan serta menyebarkan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan penjara. Tepat pada tahun 1984 Foucault mendapatkan gelar *License de Philosophi* di *Ecole Normale Superiur*, dimana terdapat beberapa nama guru atau seseorang yang sangat berpengaruh terhadap karir Foucault, seperti Jean Hyppolite, Georges Canguilhem dan Georges Dumezil.[16] Foucault sendiri sempat menjadi pengajar di beberapa perguruan tinggi, seperti Universitas Paris, Paris-Nanterre, Universitas Vincennes, dan Clermond Ferrand.

[15] Listiyono Santoso, *Epistemologi Kiri* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), 52.
[16] K. Bertens, *Sejarah Filsafat Kontemporer Prancis Jilid II* (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 289.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Foucault meninggal dunia pada usianya yang ke-57 tahun –25 Juni 1984- setelah beberapa hari sempat dirawat di Rumah Sakit *Salpetriere*.[17]

Foucault merupakan sosok yang sangat produktif dalam membuat suatu karya, baik berupa pemikiran maupun yang sudah dijadikan sebuah buku. Beberapa karya Foucault diantaranya adalah *Maladie Mentale et Psychologie, Folie et Deraison: Historie de la Folie a L'age Classique, Naissance de la Clinque, Deat an The Labyrint, The Order of Things, Archeology of Knowledge, Nietsze Genealogi History, Power of Knowledge*, dan lain sebagainya.[18]

C Konsep Pemikiran Michel Foucault

1. Konsep Kekuasaan

Pada tahun 1968 Foucault mulai tertarik dengan konsep yang telah ditawarkan oleh Nitszeche terkait kekuasaan. Pada tahun tersebut pemikiran terkait kekuasaan memang sedang berkembang, dan ketertarikan Foucault tersebut disebabkan oleh keikutsertaannya dalam kuliah yang diampu oleh Nitszeche. Foucault sendiri awalnay sudah memberikan beberapa pembahasan terkait konsep kekuasaan tersebut, namun secara implisit masih belum memuaskan dirinya, dan kemudian

[17] Poedjawijatna, *Tahu dan Pengetahuan: Pengantar ke Ilmu dan Filsafat* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 61.
[18] Arief, *Metode dan Epistemologi Estetika: Karya Esensial Faucault 1954* (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencoba untuk menganalisa dan mengembangkan pemikiran Nitszeche terkait kekuasaan.[19]

Foucault merupakan seorang yang skeptis terhadap berbagai macam kebenaran, sebab Foucault menganggap bahwa terdapat kemungkinan suatu kebenaran tersebut merupakan interpretasi atas kebenaran dunia sebagai aspek historis. Foucault berpendapat bahwa suatu pengetahuan[20] bisa menjadi sarana dalam memperoleh kekuasaan, apabila aspek historisitas dari suatu sejarah dianggap benar. Foucault sendiri pada dasarnya juga menggunakan berbagai macam konsep atau gagasan yang telah diutarakan orang lain sebagai sautu referensi, namun gagasan-gagasan tersebut tidak secara langsung diterimanya dan hanya yang diperlukan serta sesuai dengan kebutuhannya yang kemudian dijadikan sebagai alat analisa untuk konsepnya.[21]

Perihal filsafat politik, Foucault dipengaruhi oleh pemikiran Nitszeche mengenai kekuasaan yang kemudian dianalisanya dan menyatakan bahwa dalam politik tradisional terdapat suatu legitimasi yang mempengaruhinya. Lebih lanjut Foucault menyatakan bahwa suatu kekuasaan biasanya diimplementasikan oleh suatu lembaga negara secara tertutup dengan tujuan agar masyarakat mematuhi

[19] Mudzakkir, "Tubuh dan Kekuasaan: Telaah Pemikiran Michel Foucault" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, 2006), 83.
[20] Foucault menyatakan bahwa terdapat dua aspek yang menghubungkan pengetahuan dan rasionalitas pada diri manusia. *Pertama*, setiap pengetahuan yang dimiliki oleh individu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya, dan setiap ilmu rasional pasti akan mengalami perubahan terhadap nilai kebenarannya. *Ibid.*, 47.
[21] *Ibid.*, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai macam aturan atau perintah yang dikeluarkan oleh suatu lembaga maupun negara yang memiliki otoritas penuh terhadap suatu kepemimpinan.[22]

Konsep terkait kekuasaan Foucault tidak seperti halnya apa yang disampaikan oleh sudut pandang Marxian dan Weberian. Menurut Foucault kekuasaan bukan sesuatu yang dipahami sebagai suatu hubungan yang terdapat aspek kepemilikan di dalamnya –seperti property, pencapaian ataupun suatu hak istimewa-. Kekuasaan juga tidak diimplementasikan secara negatif yang dilakukan secara represif maupun koersif yang dilakukan oleh suatu institusi pemilik kekuasaan –seperti negara-. Kekuasaan juga bukan seperti yang disampaikan oleh kelompok Marxian, dimana fungsi dominasi dari kelas tertentu yang disandarkan pada aspek ekonomi atau manipulasi ideoligi, maupun berdasarkan suatu kharisma –weberian-. Foucault beranggapan bahwa kekuasaan harus dipandang secara positif dan produktif, juga harus dipandang sebagai suatu relasi yang beranekaragam dan tersebar seperti suatu jaringan yang padanya terdapat ruang lingkup yang strategis.[23]

Perbincangan terkait kekuasaan sendiri tidaklah harus tentang definisi ataupun subjek pemilik kekuasaan tersebut, namun yang harus dipahami adalah bagaimana cara atau implementasi dari kekuaaan tersebut dilaksanakan. Cronin dalam Mudhoffir menjelaskan bahwa

[22] Lechte John, *Pengetahuan dan Metode: Karya-Karya Penting Michel Foucault & Paul Robinow*, terj. Arief (Yogyakarta: Jalasutra, 2002), 63.
[23] Abdil Mughis Mudhoffir, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik", *Jurnal Sosiologi Masyarakat,* Vol. 18, No. 01 (2013), 77-78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya kekuasaan dipandang secara substantive, yakni terdapat pada suatu hal dan dijalankan oleh sesuatu. Akan tetapi dewasa ini kekuasaan merupakan suatu hubungan relasional yang berfungsi sebagai jaringan antar subjek. Perubahan makna terhadap kekuasaan tersebut berdampak pada implementasi dari kekuasaan tersebut, serta apa yang menjadi poin penting dalam menganalisis operasi dari kekuasaan.[24]

Berdasarkan hal tersebut, maka kekuasaan harus dipahami sebagai suatu bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang kekuasaan tersebut bekerja. Kekuasaan harus dipahami sebagai suatu hal yang membuat relasi kekuatan tersebut dapat bertahan lama, sebagai pembentuk sistem dari relasi tersebut ataupun yang mengisolasi suatu sistem dari sistem lain yang terbentuk dari relasi kekuatan. Oleh sebab itu, kekuasaan adalah suatu strategi yang memberikan dampak atau implikasi berupa relasi kekuatan.

Kekuasaan bukan tidak berkaitan dengan kepemilikan –subjek menguasai subjek atau objek lain-, namun kekuasaan tersebut tersebar dan berada dimanapun –*omnipresent*- secara imanen terdapat pada setiap relasi sosial. Pada dasarnya kekuasaan senantiasa diproduksi oleh setiap momen atau relasi, sebab kekuasaan tersebut datang dari berbagai macam aspek. Mudhoffir kemudian mencoba menyimpulkan beberapa proposisi terkait konsep kekuasaan Foucault, *pertama*, kekuasaan

[24] *Ibid.*, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukanlah sesuatu seperti kepemilikan, namun kekuasaan dioperasikan dari berbagai macam tempat dari relasi yang terus bergerak. *Kedua*, relasi kekuasaan sendiri tidak seperti suatu hierarki, dimana ada yang menguasai –*powerfull*- dan ada yang dikuasai –*powerless*-. *Ketiga*, relasi kekuasaan bersifat intensional dan tidak subjektif. *Keempat*, setiap terdapat suatu kekuasaan, maka terdapat pula anti kekuasaan atau *resistance* yang terdapat dalam relasi kekuasaan.[25]

2. Arkeologi Pengetahuan

Sebelum berbicara mengenai kekuasaan, Foucault terlebih dauhulu membicarakan mengenai sejarah dari pengetahuan. Akan tetapi, Foucault tidak membicarakan atau membahas suatu bentuk pengetahuan secara spesifik dalam suatu disiplin ilmu tertentu dari waktu ke waktu, melainkan sejarah pengetahuan sebagai suatu *episteme* yang mana merupakan bentuk pengetahuan yang otoritatif pada masa tertentu. Penelusuran terhadap sejarah tersebut disebabkan oleh otoritatifikasi atau legitimasi dari pengetahuan tersebut. Struktur dari pengetahuan yang otoritatif tersebut yang nantinya mempengaruhi praktek-praktek sosial –cara berpikir, berbicara ataupun bertindak-.

Karya Foucault yang berjudul *The Archeology of Knowledge* dijelaskan bahwa arkeologi yang dimaksud bukanlah suatu metode penulusuran sejarah antropologis yang mengandaikan bahwa sejarah dari pengetahuan berkembang secara linear. Bentuk dari suatu

[25] *Ibid.*, 80.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan menurut Foucault pada dasarnya tidak terjadi perkembangan secara evolutif dari setiap masanya, melainkan hanya sebatas pergeseran makna atau bentuk ke wacana atau diskursus. Arkeologi sendiri digunakan Foucault dalam studi sejarahnya agar bisa memperoleh suatu *episteme*[26], dimana fungsi dari *episteme* kemudian dianggap sebagai suatu disposisi pengetahuan yang memiliki ciri khusus pada suatu zaman.[27] Sebagai contoh seperti halnya konsep kegilaan yang disadurkan pada individu tidak melekat begitu saja, namun ada suatu relasi kuasa yang membuat konsep kegilaan tersebut yang kemudian dikonstitusikan dalam suatu diskursus. Jadi terdapat suatu bentuk diskursus sebelum munculnya istilah kegilaan, sebab istilah atau konsep kegilaan tidak senantiasa disandarkan pada gangguan jiwa.[28]

Foucault menyebutkan bahwa pada aspek statemen –*enonce*- terdapat titik aksentuasi dalam konsep diskursusnya. Statemen tersebut bukan berarti suatu entitas logis maupun psikologis, bukan juga idealisme maupun suatu ungkapan atau proposisi –sebab suatu ungkapan yang berbeda bisa jadi hanyalah suatu pengulangan terhadap suatu statemen yang sama-. Salah satu penyebab dari munculnya suatu statemen tersebut bisa disebabkan oleh suatu statemen yang lain.[29]

---

[26] *Episteme* merupakan suatu bentuk pengetahuan yang sudah disepakati pemaknaannya dalam kondisi dan zaman tertentu. *Ibid.*, 81.
[27] Michel Foucault, *Kegilaan dan Peradaban*, terj. Yudi Santoso (Yogyakarta: Pustaka Narasia, 2002), 321.
[28] Bertens, *Sejarah Filsafat*, 304.
[29] Michel Foucault, *Arkeologi Pengetahuan*, terj. Inyiak Ridwan Muzir (Yogyakarta: Ircisod, 2012), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Statemen dalam pandangan Foucault memiliki makna tekstual yang padanya tidak memerlukan suatu interpretasi tertentu, hal tersebut juga sesuai dengan konsep *speech act* John Austin dan John Saerle, dimana tidak perlu menelusuri makna terdalam dari apa yang telah diutarakan. Memang terdapat suatu relasi kuasa yang terdapat pada statemen yang terhubung dengan statemen yang lain, dan hal tersebut tidak bisa dihindari. Foucault sendiri lebih tertarik terhadap *speech act* yang beracuan pada konteks lokal dan pragmatis dalam penentuan *speech act* tersebut, sebab *speech act* yang apa adanya tersebut kemudian membentuk suatu realitas. Ketertarikan Foucault tersebut disebabkan juga karena terdapat suatu pembeda antara statemen pengetahuan dan statemen keseharian. Sebagai contoh adalah mengenai pernyataan atas akan adanya suatu fenomena alam tertentu –gerhana, badai, tsunami , dan lain sebagainya-. Jika statemen tersebut dilontarkan oleh orang biasa atau awam, maka statemen tersebut hanya akan menjadi suatu hal atau statemen yang biasa. Akan tetapi, jika statemen tersebut dilontarkan dari seorang ahli, maka statemen tersebut akan menjadi suatu realitas baru yang secara langsung diterima oleh masyarakat.[30]

Foucault menggunakan beberapa konsep dalam upayanya menelusuri suatu diskursus, dimana konsep tersebut nantinya akan saling berkaitan satu sama lain dan konsep tersebut antara lain adalah *positivitas, apriori historis* dan *arsip*. *Positivitas* merupakan sebuah

[30] Santoso, *Epistemologi Kiri*, 171-173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesatuan diskursus pada periode tertentu atau juga bisa dianggap sebagai suatu dialog antara pengarang dengan pengarang yang lainnya. *Positivitas* sendiri memiliki ruang lingkup yang tidak seluas suatu kajian keilmuan dan tidak pula terlalu sempit hanya berdasarkan suatu aliran atau madzhab tertentu. Sementara itu, *apriori historis* adalah hal yang menyebabkan suatu *positivitas* muncul pada periode tertentu dengan menggunakan suatu syarat dan aturan suatu diskursus, dimana aturan maupun syarat tersebut tidak berasal dari luar, melainkan terbentuk dari dalam diskursus tersebut. Hasil akhir dari *posistivitas* yang disebabkan oleh *apriori historisnya* masing-masing tersebut yang kemudian disebut Foucault dengan sebutan *arsip*.[31]

Proses penelusuran suatu *episteme* menurut Foucault sebaiknya tidak menggunakan sistem penggalian sejarah dengan gaya lama, sebab menurutnya sitem tersebut memiliki corak evolusi, kontinuitas dan totalitas, sehingga tidak ada pengembangan untuk selanjutnya. Oleh sebab itu, harus ada suatu penekanan terhadap konsep arkeologinya, maka dari itu Foucault merumuskan beberapa prinsip yang kemudian disebut dengan analisis arkeologi. *Pertama*, sistem kerja pada arkeologi Foucault pada dasarnya tidak ingin membahas suatu temuan yang sudah ada sebelumnya –seperti suatu teori atau konsep tertentu-. Arkeologi memfokuskan dirinya pada upaya untuk membongkar atau menjelaskan

[31] Moh. Fiqih Firdaus, "Memaknai Paradigma Integrasi Twin Towers UINSA: Studi Kritis dalam Pandangan Michel Foucault" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 24-25.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu mekanisme implementasi dari suatu diskursus. Mekanisme atau regulasi tersebut yang secara tidak disadari mengontrol atau mengatur suatu diskursus, dan mekanisme tersebut bisa berasal dari manapun tanpa memandang suatu status tertentu.[32]

Kedua, berbicara mengenai suatu kontradiksi yang terdapat pada suatu pemikiran, biasanya terdapat suatu kontradiksi yang hanya terlihat pada permukaannya saja dan akan tidak terlihat jika dilakukan pemahaman yang mendalam terhadapnya. Selain itu juga terdapat kontradiksi yang akan nampak jika dilakukan suatu kajian atau pemahaman yang mendalam terhadap suatu diskursus, dan kontradiksi tersebut yang nantinya akan menjadi fokus kajian pada analisis arkeologi Foucault. Penjelasan yang akan diungkapkan oleh analisis arkeologi terhadap kontradiksi tersebut harus dijelaskan secara tranparan atau apa adanya.[33]

Ketiga, analisis arkeologi Foucault hanya membahas atau mengkaji suatu diskursus dalam periode tertentu. Lebih lanjut bahwa Foucault bertujuan untuk membandingkan suatu implementasi diskursus dengan implementasi diskursus atau non-diskursus –lembaga, kejadian politik, proses ekonomi maupun sosial- lain yang masih berada pada periode yang sama. Sebagai contoh adalah pada saat menganalisis fenomena non-diskursus pada abad ke-18 mengenai berdirinya suatu klinik yang

[32] Bertens, *Sejarah Filsafat*, 349.
[33] *Ibid.*, 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dalamnya terdapat aspek-aspek pokitik, kebutuhan ekonomis maupun sosial. Pada saat berdirinya klinik tersebut, konsep-konsep mengenai medis sangat dipengaruhi oleh *supra-struktur*. Analisis arkeologi sendiri tidak ingin mempersoalkan terkait penyebab berdirinya klinik tersebut, akan tetapi analisis tersebut ingin membahas dan menemukan ruang lingkup beserta fungsi dari diskursus atau non-diskursus tersebut.[34]

Keempat, analisis arkeologi ingin melakukan pengamatan terhadap berbagai macam tranformasi atau perubahan. Arkeologi mencoba untuk menunjukkan suatu perbedaan yang terjadi pada setiap periodenya, hal tersebut tidak terjadi pada metode sejarah purbakala yang justru ingin menutupi perbedaan-perbedaan tersebut. Oleh sebab itu, analisis arkeologi Foucault sangat menilai tinggi suatu faktualitas.[35]

3. Konsep Genealogi dan *Disciplinary Power* Michel Foucault

Pada tahun 1986 minat analisa Foucault mengalami suatu pergeseran dari yang berawal pada penelusuran suatu bentuk diskursus berubah menjadi ke penelusuran terhadap teknologi kekuasaan, dimana hal tersebut nantinya akan berdampak pada penerapan suatu metode dari arkeologi –pengetahuan- ke genealogi kekuasaan. Pada karyanya yang berjudul *Discipline and Punish* dijelaskan bahwa Foucault tidak lagi membahas mengenai diskursus maupun relasi diskursif yang menjadi fokus dari kajiannya. Akan tetapi, Foucault lebih memfokuskan

[34] Firdaus, *Memaknai Paradigma*, 26-27.
[35] George Ritzer, *Teori Sosial Postmodern* (Yogyakarta: Juxtapose, 2009), 72.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajiannya pada aspek relasi beserta implementasinya pada suatu hal yang bersifat non-diskursif –pada suatu institusi sosial dan praktek sosial-. Perhatian utama dari genealogi ini sangat berbedan dengan arkeologi yang memfokuskan pad aide, pengetahuan dan aspek kesadaran manusia. Geneaologi lebih tertuju pada tubuh suatu individu, dimana implikasi atau dampak dari sistem kekuasaan tersebut dapat diketahui.[36]

Sebelumnya Foucault sudah menyinggung keterkaitan antara suatu sejarah dari bentuk pengetahuan dan bentuk kekuasaan dengan tubuh. Namun Foucault tidak secara terang-terangan menyebutkan bahwa suatu tubuh dari individu merupakan objek dari relasi kekuasaan yang terdapat pada masyarakat modern. Pada *Discipline and Punish* Foucault mengidentifikasi dan menjelaskan secara gamblang bahwa konsep relasi kekuasaan-pengetahuan tersebut adalah suatu yang nyata, serta tubuh merupakan suatu objek dari beroperasinya sistem kekuasaan. Pada karya tersebut yang menjadi fokus kajiannya adalah perihal relasi kekuasaan-pengetahuan yang tertanam pada tubuh, mengendalikan serta menjadikannya sebagai objek pengetahuan.[37]

Genealogi pada dasarnya bukan suatu teori atau konsep, melainkan lebih kepada suatu analisis berdasarkan suatu sudut pandang sebagai titik pijaknya yang kemudian mencoba untuk membongkar suatu

[36] Mudhoffir, *Teori Kekuasaan*, 84.
[37] Barry Smart, *Michel Foucault* (New York: Routledge, 2002), 43.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktek sosial yang terdapat pada suatu diskursus. Foucault berpendapat bahwa pada suatu pengetahuan di dalamnya terdapat aspek kebenaran dan kesalahan yang didasarkan pada suatu kekuasaan, sebab berbagai macam diskursus tersebut terdapat banyak retorika atau relasi yang akan menimbulkan suatu kekuasaan.[38] Hal tersebut sedikit banyak akan bersingunggan dengan konsep arkeologi yang sebelumnya dibahas, oleh sebab itu genealogi disini merupakan suatu kelanjutan dari arkeologi.

Davidson berpendapat bahwa ruang lingkup dari geneaolgi sendiri lebih luas daripada arkeologi, hal tersebut sesuai dengan apa yang telah diutarakan oleh Foucault dalam hipotesanya yang kedua terkait kebenaran –perihal metodologi-. Habermas sendiri berpendapat bahwa apa yang ingin diwariskan oleh Foucault dengan genealoginya adalah suatu "presentisme" atau lebih mudahnya bisa dianggap bahwa suatu sajarah yang terjadi saat ini atau yang akan datang merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sejarah yang sebelumnya. Lebih lanjut yang diinginkan Foucault dalam genealoginya adalah ingin melepaskan sejarah dari ilusi identitas[39] dengan cara menganalisa kemunculan suatu diskursus dan pluralism sejarah secara faktual.

Analisis genealogi yang dibahas sebelumnya nanti akan memunculkan suatu tubuh yang dianggap sebagai objek pengetahuan

[38] Siti Rodliyah, "Study Analisis Genealogis Michel Foucault Terhadap Narasi Amin Rais Tentang Pemilu Presiden" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 49.
[39] Identitas atau ego merupakan bagian dari konsep sejarah tradisional, dan pembentuk dari suatu sejarah tersebut adalah "ide" yang merupakan arah dari fokus kajian genealogi Foucault. Lihat: Firdaus, *Memaknai Paradigma*, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sekaligus sebagai sasaran untuk berjalannya suatu kekuasaan. Tubuh sendiri dalam pemikiran Foucault merupakan suatu inti atau bagian paling penting dalam berjalannya suatu relasi kekuasaan. Konsepsi terkait tubuh sendiri disandingkan atau diposisikan pada ranah politik, dimana hal tersebut membuatnya masuk dalam relasi kekuasaan sehingga tubuh tersebut menjadi patuh dan produktif –berguna- dalam pandangan politik-ekonomi.[40]

Hasil dari analisa genealogi adalah suatu konsep yang disebut dengan *disciplinary power*. *Disciplinary power* sendiri merupakan sistem dari kekuasaan yang dioperasikan dengan tujuan untuk membuat tubuh menjadi disiplin sehingga membuatnya patuh dan berguna demi suatu kepentingan. Foucault berpendapat bahwa kekuasaan seperti itu paling efisien berada pada suatu lembaga institusi yang memiliki kecenderungan tertutup dari kehidupan masyarakat –seperti penjara, rumah sakit jiwa dan pusat rehabilitasi-, maupun pada institusi pendidikan. Kekuasaan yang seperti itu pada dasarnya ingin menampilkan suatu keadaan yang mana tubuh dari suatu individu dibiasakan mengalami suatu kepatuhan, sehingga membuatnya menjadi suatu keadaan yang bisa dimaklumi dan biasa saja. Hal tersebut yang nantinya Foucault sebut sebagai upaya praktek normalisasi dari berjalannya suatu kekuasaan terhadap tubuh individu, dan konsep

[40] Smart, *Michel Foucault*, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disciplinary power sendiri ditujukan sebagai penunjuk dari bentuk kekuasaan beserta wujud dari sistem kekuasaan tersebut.[41]

Foucault sendiri memberikan beberapa metode terkait pendisiplinan terhadap suatu tubuh, yakni seni penyebaran dan kontrol aktifitas. Hal yang pertama kali harus dilakukan dalam proses pendisiplinan tubuh adalah dengan cara disebar, dimana terdapat suatu pembatas antara satu individu dengan individu yang lainnya. Hal tersebut ditujukan agar individu tersebut tidak saling berinteraksi atau menghindari suatu dialog antar individu yang berpotensi merusak ritme dari regulasi yang telah dibentuk. Metode yang kedua adalah dengan cara mengontrol aktifitas dari tubuh yang ingin disiplinkan atau dikuasai. Pengendalian terhadap aktifitas tubuh ini dilakukan dengan pengaturan waktu, dimana tubuh akan dikonstruk hingga memiliki suatu ritme tertentu sesuai dengan keinginan. Tujuan dari beberapa metode tersebut pada dasarnya agar tubuh memperoleh suatu ketepatan sikap dalam melakukan suatu tindakan –efisiensi-. Melalui metode tersebut pula suatu objek baru dari sistem kuasa –tubuh- menjadi terlatih dan lebih berguna.[42]

[41] Mudhoffir, *Teori Kekuasaan*, 85.
[42] Firdaus, *Memaknai Paradigma*, 36-37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KONSEP *KHILAFAH* DALAM PANDANGAN HTI DAN AHMADIYAH

A Konsep *Khilafah* HTI

1. Sejarah HTI

Hizbut Tahrir merupakan salah satu organisasi politik yang memiliki ideologi Islam dengan ruang lingkup internasional yang bertujuan untuk menegakkan dan memperjuangkan dakwah Islam agar kembali pada khilafah Islamiyah. Pendiri dari organisasi tersebut adalah Taqiyuddin an-Nabhani yang merupakan salah seorang ulama di Palestina. Nabhani sendiri juga seorang doktor lulusan al-Azhar Mesir dan sebelumnya merupakan seorang hakim di salah satu Mahkamah yang berada di Palestina. Sepeninggal Nabhani sendiri, Hizbut Tahrir kemudian dipimpin oleh Abdul Qodim Zallum yang kemudian digantikan oleh Syeikh Atha' Abu Rastah -secara internasional- setelah wafatnya.[1]

Hizbut Tahrir sendiri baru diakui sebagai partai dan resmi secara undang-undang pada tanggal 14 Maret 1953, sehingga membuatnya mempunyai hak untuk melaksanakan kegiatan partai sesuai dengan anggaran dasar partai.[2] Kegiatan Hizbur Tahrir tersebut sempat dilarang oleh pemerintah Yordania melalui surat resminya, sehingga membuat

[1] Endang Turmudzi dan Riza Sihabudin, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2006), 265.
[2] Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani: Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya* (Bogor: Al-Ahzar Press, 2003), 43.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktivitasnya harus dilakukan secara rahasia dengan bantuan para petinggi Hizbut Tahrir. Oleh sebab itu pula jumlah anggota Hizbut Tahrir tidak diketahui secara pasti, namun di Asia Tengah sendiri diperkirakan mencapai 100 ribu anggota.

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia sejak tahun 1980 yang bertepatan dengan masa Orde Baru. Hizbut Tahrir tersebut diperkenalkan oleh Abdurahman al-Baghdadi yang diajak oleh KH. Abdullah bin Nuh ketika bertemu pada suatu forum di Australia. Pada awalnya Hizbut Tahrir tersebut diperkenalkan oleh Abdurahman melalui berbagai macam pesantren dan universitas di Bogor, kemudian dilanjut dengan membentuk kelompok pengajian sebagai upaya eksplorasi paham Hizbut Tahrir.

Bersamaan dengan lengsernya Orde Baru pula, Hizbut Tahrir yang ada di Indonesia mencoba untuk melegalkan aktivitasnya sebagai salah satu organisasi politik kebangkitan Islam, dan secara resmi disebut dengan Hizbut Tahrir Indonesia.

Tercatat pada tahun 2003 Hizbut Tahrir Indonesia sudah tersebar di 150 kota seluruh Indonesia. Penyebaran yang dilakukan Hizbut Tahrir tersebut melalui berbagai macam lapisan masyarakat, seperti dakwah para kader di masjid, perkantoran, pabrik maupun perumahan. Selain itu, penyebaran juga dilakukan melalui berbagai macam media cetak, seperti buku, bulletin al-Islam, dan majalah al-Wa'ie yang di dalamnya berisi terkait kegiatan diskusi, seminar dan aksi unjuk rasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada upaya rekruitmen politiknya sendiri, HTI menerima berbagai macam masyarakat sebagai anggotanya dengan kriteria beragama Islam tanpa adanya kriteria khusus lainnya. HTI menjadi wadah bagi aspirasi politik umat Islam dan menyeru kelompoknya untuk mengemban dakwah Islam serta mengambil dan menetapkan seluruh aturan Islam yang ada tanpa memandang atribut lain.[3]

2. Landasan HTI mengenai konsep *Khilafah*

Berbicara mengenai konsep *Khilafah* HTI pastinya tidak lepas dari nilai-nilai yang telah didikte Hizbut Tahrir (HT) kepada kader-kadernya yang berada di Indonesia. Tidak ada perbedaan dari landasan pemikiran *Khilafah* dari mereka. Jaringan internasional maupun yang ada di Indonesia tetap memiliki tiga landasan utama mengapa mereka gencar menyuarakan *Khilafah* di seluruh penjuru dunia.

Pertama, landasan pemikiran filosofis HTI mengenai *Khilafah* didasari adanya pemahaman umat Islam secara keseluruhan bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna yang mengurusi hal terkecil (tata cara mandi, makan, masuk-keluar sebuah ruangan dan lain-lain) dari kehidupan sampai hal terbesar contohnya politik kenegaraan, budaya bangsa, dan ekonomi.[4] Dengan adanya komprehensivitas unsur-unsur kehidupan yang dibahas oleh Islam, maka HTI berpendapat bahwa harus ada negara Islam sebagai wadah penerapan hukum-hukum Islami secara terstruktur dan

[3] Rosi Selly, "Globalisasi dan Kebangkitan Khilafah Islamiyah dalam Perspektif Pemikiran Hizbut Tahrir" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 65.
[4] Syaiful Arif, "Pandangan dan Perjuangan Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia", *Aspirasi*, Vol. 7, No. 1, (2016), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masif. Kesempurnaan Islam sebagai agama telah tercantum dan dalam al-Qur'ān yaitu pada Q. S. al-Māʾidah ayat 3:

"...ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينا..."

"..Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu..."[5]

HTI mengambil kesimpulan bahwa ditegakkannya *Khilafah* merupakan tanda bagi kesemupurnaan Islam. Hal ini berkaitan dengan ayat al-Qur'ān yang membahas mengenai Islam adalah agama yang membahas problematika umat secara komperhensif serta adanya tuntutan agar menjadi muslim yang totalitas.[6] Dalam artian, *Khilafah* termasuk bukti serta prasyarat bagi penerapan kesempurnaan Islam. Dikatakan sebagai bukti sebab dengan adanya sistem pemerintahan *Khilafah* Islam telah menyediakan undang-undang kehidupan yang bersifat publik, yang menemukan puncak di dalam pendirian negara. Disebut prasyarat disebabkan kesempurnaan Islam itu masih bersifat potensial. Ia harus diberlangsungkan melalui penegakan *Khilafah*.

Kedua, landasan historis HTI dalam memperjuangkan *Khilafah* adalah realitas di mana umat Islam sekarang mengalami kemrosotan yang cukup signifikan. Banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya HTI melihat bahwa efek dari hegemoni negara-negara Barat telah menimbulkan

[5] al-Qur'ān, 5: 3.
[6] Arif, *Pandangan dan Perjuangan*, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

efek negatif bagi kalangan umat Islam maupun negara-negara Islam. Kondisi yang demikian membuat semangat HTI lebih membara dalam menegakkan *Khilafah*. Hegemoni tersebut didukung salah oleh gerakan orientalisme yang mulai menjamur dan menjadi diskursus sejak abad 18-19.[7]

Ketiga, dalam landasan normatif, menurut HTI ada beberapa perintah Tuhan mengenai penegakan *Khilafah* yang tercantum pada al-Qur'ān, Hadis, ijma' sahabat dan qiyas.[8] HTI memaknai beberapa ayat al-Qur'ān yang menjelaskan pentingnya *Khilafah* di dalam kehidupan ini, salah satunya:

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ ...

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu..." (Q.S. al-Mā'idah ayat 49).[9]

Dengan adanya ayat di atas, HTI berkesimpulan bahwa Allah memberi perintah kepada Nabi agar menjelaskan semua permasalahan yang ada di kehidupan ini ternyata tidak lepas dari hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah. Dengan demikian maka diperlukan seorang hakim dalam

[7] Fahrul Anam, "Hegemoni Barat Terhadap Kebudayaan Islam: Menguak Paham Orientalis Esward W. Said", *International Conference On Syariah & Law*, (2021), 114.
[8] Ainur Rofiq al Amin, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia* (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2012), 21.
[9] al-Qur'ān, 5: 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutuskan segala perkara setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ayat di atas mengandung tuntutan yang bersifat obligatory. Otomatis hakim yang menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam menentukan aturan-aturan dari segala permasalahan umat yang berlandaskan perintah-perintah Allah adalah *khalīfah*. Jadi ayat di atas mengandung makna tersirat mengenai perintah penunjukkan seorang *khalīfah* yang memiliki tugas sebagai hakim setelah Nabi Muhammad SAW.

3. Sistem Pemerintahan *Khilafah*

Pertama, bahwa *Khilafah* itu merupakan suatu sistem pemerintahan umum bagi kaum muslimin seluruhnya di dunia. Jadi struktur pemerintahan *Khilafah* tidak seperti sistem pemerintahan khusus, dalam artian sistem ini tidak seperti kepemimpinan seorang wali gubernur di suatu provinsi. Namun, *Khilafah* merupakan sistem pemerintahan yang mempersatukan umat Islam. Mengapa demikian karena sistem pemerintahan *Khilafah* bersifat general bagi umat Islam di seluruh dunia, sudah tidak lagi melihat batas-batas negara-bangsa (nation state) yang ada sekarang ini.[10]

Kedua, terdapat peran utama didirakannya sistem pemerintahan *Khilafah* adalah agar umat Islam menerapkan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan, misalnya dalam aspek politik kenegaraan yang kerap kali manusia lalai dalam memperhatikan moralitas dalam aspek ini.[11] Selain itu

[10] Taqiyuddin An Nabhani, *As Syakhshiyah Al Islamiyah*, (Beirut : Darul Ummah, 2003), 14.
[11]Citra Ageng Saputri, "Konsep Khilafah dalam Pandangan Taqiyuddin an-Nabhani dan Abdurahman Wahid" (Skripsi—Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, 2020), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di bidang ekonomi, umat diharapkan senantiasa menerapkan nilai-nilai ekonomi sesuai yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sama halnya dengan aspek-aspek kehidupan yang lain, diwajibkan tidak melenceng dari syariat Islam. Penerapan syariat ini adalah salah satu bentuk politik dalam negeri dari negara yang telah menegakkan *Khilafah*.

Ketiga, dengan tegaknya *Khilafah* di seluruh dunia, secara tidak langsung merupakan cara dakwah Islam ke seluruh dunia. Telah tercantum dalam al-Qur'ān tentang memberikan menyebarkan kebenaran (agama Islam):

فَٱصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡمُشۡرِكِينَ

"Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik" (Q. S. al- Ḥijr ayat 94).[12]

Metode dalam menyebarluaskan ajaran-ajran Islam adalah dengan menjalankan jihad fi sabilillah ke berbagai wilayah yang ada di dunia. Jihad fi sabilillah inilah yang patokan bagi segala urusan bernegara maupun bermasyarakat dari negara *Khilafah*.

إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa

[12] al-Qur'ān, 15: 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar" (Q. S. al-Ḥujurāt ayat 15)[13]

4. Syarat Terwujudnya *Khilafah*

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, terwujudnya Khilafah wajib memenuhi keempat syaratnya yaitu:[14]

a. Dilarang keras kekuasaan negeri mengandalkan apalagi bersandar kepada negara lain. Hanya diperbolehkan mengandalkan ketangguhan serta kecerdasan kaum muslimin. Apalagi negara berada dalam kekangan negara-negara non-Islam.

b. Mengenai keamanan serta kesejahteraan negara harus tidak ada yang ditutup-tutupi. Dalam artian, keamanan serta kesejahteraan negara timbul dikarenakan kekuatan kaum muslimin sebagai satu-satunya kekuatan islam. Kaum muslimin dianjurkan saling menjaga satu dengan yang lain.

c. Terwujudnya *Khilafah*, jika suatu negera secara totalitas menerapkan undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak lupa untuk ikut menyebarluaskan agama Islam kepada siapapun karena Islam adalah kebenaran.

d. Sebelum pembaiatan, seorang *khalīfah* wajib lolos dari beberapa syarat yang telah ditetapkan agar proses in'iqad (akad) bisa dikatakan sah.

[13] *Ibid.*, 49: 15.
[14] An-Nabhani, *Nizham Al-Hukmi*, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat in'iqad antara lain; muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka, mampu bertanggung jawab sebagai *Khilafah*.

Misalkan ada sebuah kondisi di mana suatu negeri telah menegakkan *Khilafah* dan telah membaiat seorang *khalīfah*, kaum muslimin diwajibkan bergabung di bawah panji *Khilafah* dan berbaiat kepada *khalīfah* yang telah terpilih. Menurut Taqiyuddin, jika ada beberapa umat Islam tidak mau bergabung dalam panji *Khilafah* maka semua akan berdosa di hadapan Allah.[15]

Maka dari itu menjadi seorang *khalīfah* wajib mengajak umat agar bersedia berbaiat kepadanya. Bagi kaum muslimin menolak berbaiat kepadanya maka ia termasuk dalam golongan yang memberontak atau biasa disebut bughat.[16] Secara otomatis, meskipun itu kaum muslimin tetapi mereka merupakan pemberontak jadi mereka wajib diperangi oleh *khalīfah* sampai mereka bersedia tunduk dan patuh kepadanya serta ikut dalam penegakan *Khilafah*.

B Konsep *Khilafah* Ahmadiyah

1. Sejarah Ahmadiyah

Ahhamdiyah merupakan suatu gerakan keagamaan yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1889. Nama Jemaat Ahmadiyah sendiri dapat dipahami sebagai suatu perkumpulan atau kelompok yang

[15] *Ibid.*, 21.
[16] *Ibid.*, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bersatu serta bekerja sama untuk mencapai suatu program dan tujuan yang sama. Alasan pemakaian nama Ahamadiyah tersebut disebabkan karena nama tersebut merupakan salah satu nama Rasulullah yang diinformasikan kepada Nabi Isa AS dalam surat al-Shaf ayat 6 yang menyatakan bahwa akan datang seorang Nabi dan Rasul yang Bernama Ahmad.

Kemunculan Ahmadiyah sendiri di India tidak bisa dilepaskan dari kemunduran umat Islam yang ditandai dengan runtuhnya kerajaan Utsmani pada tahun 1683 yang juga dibarengi dengan perkembangan sains di dunia Barat. Kerajaan Islam di India sendiri pada saat itu -kerajaan Mughal- juga sedang berada pada masa kritis yang disebabkan oleh beberapa faktor; *pertama*, melemahnya pemerintahan yang disebabkan oleh penurunan moral dan pola hidup yang glamor dari para pejabatnya pasca Aungrazeb. *Kedua*, terdapat beberapa pemberontakan yang dilakukan secara kontinu oleh golongan Hindu dan Sikh di India yang merupakan mayoritas penduduk di negara tersebut. *Ketiga*, terdapat campur tangan dari Inggris yang sudah datang ke India sejak abad ke 15.[17]

Orientasi dari pendirian Ahmadiyah tersebut adalah sebagai pembaharuan pemikiran umat Islam. Ghulam Ahmad merasa mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terkait Islam dalam

[17] Ahmad Hudori, "Khilafah Islamiyah Perspektif Ahmadiyah" (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 31-32.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memajukannya dengan memberikan beberapa interpretasi baru terhadap sumber hukum Islam yang disesuaikan dengan konteks zamannya. Hal tersebut dilakukan dengan menulis kitab yang kemudian dijadikan sumber rujukan setelah al-Qur'an, yakni *Tadzkirah*.

2. Ahmadiyah Qadian dan Lahore

Seiring berkembangnya zaman, pada tahun 1914 Ahmadiyah terbagi menjadi dua golongan atau kelompok yang disebabkan oleh perbedaan akidah. *Pertama,* Ahmadiyah Qadian berpusat di Qadian yang berada di bawah pimpinan langsung dari putra Ghulam ahmad, yakni Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad. Ahmadiyah Qadian beranggapan bahwa Ghulam Ahmad merupakan seorang Nabi dan Ghulam Ahmad juga yang diramalkan dalam surat al-Shaff ayat 6, meski bukan Nabi dalam artian membawa syari'at yang baru, melainkan menghidupkan kembali ajaran Nabi Muhammad SAW.[18] Lebih lanjut, peranan nabi tersebut tidak hanya sampai pada Ghulam Ahmad, melainkan juga pada keturunannya hingga sampai pada nabi *buruzi* -nabi yang tidak membawa syari'at-. Ahmadiyah Qadian berpedoman bahwa kekuasaan tertingginya harus dipegang oleh seorang khalifah.

Sementara itu, Ahmadiyah Lahore berpusat di Lahore -Pakistan- dengan pemimpinnya yang Bernama Maulana Muhammad Ali yang merupakan sekretaris dari Ghulam Ahmad sendiri. Ahmadiyah Lahore beranggapan bahwa Ghulam Ahmad hanyalah seorang pembaharu

[18] Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, 2005), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti halnya para pembaharu lainnya pada saat itu dan bukan nabi. Para pembaharu tersebut tentunya hanya memperoleh beberapa pengetahuan yang belum masuk kriteria dari wahyu kenabian. Kekuasaan tertinggi Ahmadiyah Lahore sendiri terdapat pada kongres dan gerakannya berdasarkan Pedoman Besar (Shadr Anjuman Ahmadiyah).

Dewasa ini pimpinan rohani tertinggi dari Ahmadiyah Qadian adalah Khalifatul Masih V -Mirza Masroor Ahmad- yang berada di London, Inggris. Sedangkan Ahmadiyah Lahore sendiri merupakan organisasi jaringan tanpa otoritas internasional yang terpusat pada satu wilayah, yang tentunya berbeda dengan Ahmadiyah Qadian yang memiliki wilayah tertentu sebagai pusatnya.[19]

Akan tetapi kedua organisasi tersebut memiliki kesamaan, yakni sama-sama menganggap bahwa Ghulam Ahmad adalah seorang Isa al-Masih yang telah diramalkan sebelumnhya oleh Nabi Muhammad SAW. Namun keduanya memiliki sedikit perbedaan prinsip, dimana Ahmadiyah Qadian mempercayai bahwa Ghulam Ahmad merupakan seorang pembaharu dan juga nabi, sedangkan Ahmadiyah Lahore hanya menganggapnya sebagai seorang pembaharu saja.[20]

3. Doktrin Khilafah Ahmadiyah

[19] *Ibid.*, 73.
[20] *Ibid.*, 76-79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi tentang *Khilafah* memberi sinyal bahwa *khalīfah* adalah pemimpin pengganti untuk mengatur segala aspek kehidupan umat. Ghulam Ahmad selaku pelopor Ahmadiyah merasa memiliki kewajiban serta tanggung jawab moral guna melanggengkan nilai-nilai Islam salah satunya dengan cara menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'ān yang sesuai dengan kondisi zaman.[21] Selain itu, menurut Ghulam Ahmad *Khilafah* yang lebih mengarah pada spiritualitas seorang hamba.

Pemahaman terkait sistem *Khilafah* menurut Ahmadiyah memiliki orientasi pada spiritualitas dan berkarakter agamis. Pemahaman jemaah Ahmadiyah tersebut didasarkan pada ayat al-Qur'an surat an-Nūr ayat 55 sebagai berikut:[22]

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku, dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik"

Ayat di atas dipahami sebagai suatu latar belakang dalam mendirikan negara Islam bagi jemaah Ahmadiyah, selain itu ayat tersebut juga meramalkan bahwa akan hadirnya negara atau kerajaan Islam di masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut maka

[21] Muhammad Muhtador, "Doktrin Kenabian Ahmadiyah Perspektif Teologis dan Analisis Sejarah Kemunculan", *JUSPI*: *Jurnal Sejarah Peradaban Islam,* Vol. 4, No. 2 (2021), 78.
[22] Muhammad Muhtador, "Khilafah Islamiyah Perspektif Ahmadiyah: Sebuah Gerakan Spiritual Keagamaan", *Esoterik*: *Jurnal Akhlak dan Tasawuf,* Vol. 2, No. 1, (2016), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlu dibangkitkannya pemimpin yang menjadi suatu pengganti dari Nabi Muhammad SAW yang merupakan penerus dari ajaran agama Islam.[23]

Lebih lanjut, jemaah Ahmadiyah menganggap bahwa sistem *Khilafah* tersebut berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain, seperti demokrasi, monarki, dan lain sebagainya yang terdapat di dunia. Ahmadiyah menganggap bahwa *Khilafah* tersebut merupakan bagian dari sistem spiritual dan keagamaan, sebab suatu kewenangan telah diberikan oleh Allah kepada *khalifah* yang juga selalu didukung dan diberkati-Nya. Seorang *khalifah* sendiri nantinya akan memiliki suatu tanggung jawab atas tugas yang sangat berat, yakni meneruskan perjuangan dari Nabi Muhammad SAW yang memiliki karakter *'ala minhajin Nubuwwah* dengan misi *liyud hirahu 'ala al-diini kullihi*.[24]

Pemahaman mengenai tiga fungsi *Khilafah*, Ahmadiyah berpatokan pada Q. S. an-Nūr ayat 56 yaitu:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ

"Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat"[25]

Ayat diatas memiliki 3 kata kunci, yaitu sembahyang, menunaikan zakat dan taat kepada rasul. Sembahyang atau sholat

[23] Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah*, 67.
[24] Muhtador, *Khilafah Islamiyah*, 85.
[25] al-Qur'ān, 24: 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan urusan pribadi hati hamba dengan Tuhan yang dalam prosesnya menimbulkan *output* ketenangan bagi diri si hamba. inilah yang dipahami Ahmadiyah sebagai fungsi sumber ketenangan. Selanjutnya, tuntutan untuk menunaikan zakat yang mempunyai nilai sosial (habluminannas) serta taat kepada rasul. Dalam hal ini terdapat fungsi ketenangan dan menjaga kekuatan agama.[26]

Telah disinggung di paragraf sebelumnya bahwa *Khilafah* yang digagas Ahmadiyah merupakan *Khilafah* yang mengarah pada spritual atau tasawuf dan tidak mengarah pada politik. Ada empat aspek spiritual dalam *Khilafah* menurut Ahmadiyah, *pertama*, nilai solidaritas.[27] Menurut pemahaman Ahmadiyah ahklak termasuk hal yang paling penting dalam hubungan hamba dengan Tuhan maupun dengan sesama hamba. Nilai solidaritas banyak terlaksanakan dalam bentuk akhlak. Jamaah Ahmadiyah memaknai dalam ranah perbuatan dan perilaku sehari-hati atau bisa disebut dengan pembentukan karakter. Pembentukan karakter ini diwujudkan dalam sebuah tindakan yang membuktikan baik dan buruknya seseorang di hadapan Tuhan.

Kedua, nilai ketaatan atau kepatuhan kepada *Khilafah*. Dalam pemahaman Ahmadiyah, patuh dan taat kepada *khalīfah* adalah

[26] Muhtador, *Khilafah Islamiyah*, 83.
[27] Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah*, 67.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban yang harus dilakukan bagi umat Islam, karena diyakini tidak boleh memiliki rasa dengki yang berlebih kepada *khalifah* dan aturan termasuk bagian dari agama. Ahmadiyah menilai bahwa, menolak perintah *khalīfah* adalah perbuatan yang melanggar ajaran yang sudah ditetapkan Allah dalam kitabnya. Disebabkan karena seorang *khalīfah* telah ditakdirkan Allah menduduki posisi tersebut dan yang mempunyai otoritas dalam memahami firman-firman Allah.[28]

Ahmadiyah mengambil nilai-nilai ini dari pernyataan Hazrat Isa Mau'ud dalam *Tadzkirah*. Bahwa seorang hamba wajib apapun dari bagian dari hidupnya sebagai pengorbanan untuk Sang Kekasih bahkan akan menelan racun demi meraih-Nya. Dalam konteks ini, umat tidak boleh melanggar perintah *khalifah* asalkan *khalifah* ini menuntun umatnya menuju Allah dengan jalan yang benar.[29]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Ketiga, nilai perdamaian. Bagi Ahmadiyah dengan perdamaian, menenangkan hati, tidak menyebar ketakutan kepada sesama umat Islam atau pun non-Islam maka keadaan akan lebih mendukung untuk umat tertarik kepada keruhanian versi Ahmadiyah.

[28] Muhtador, *Khilafah Islamiyah*, 89.
[29] *Ibid.*, 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahmadiyah selalu menanamkan nilai mencintai serta tidak ada rasa benci kepada apapun dan siapapun.[30]

Selama ini kelompok Ahmadiyah mengalami berbagai macam diskriminasi akan tetapi Ahmadiyah tetap tidak menggentarkan Ahmadi untuk meneruskan misi menegakkan agama. Mereka yakin akan adanya pertolongan, kebesaran dan kasih sayang Allah SWT yang membuat kebencian akan sirna dengan sendirinya. Seperti yang tercantum dalam Q. S. al-'Anbiyā ayat 107 yang berbunyi:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."[31]

Keempat, nilai sosial. Gerakan sosial yang diterapkan oleh jamaah Ahmadiyah adalah sumbangan wajib bagi anggota yang mengalami kekurangan dalam aspek ekonomi. Dalam pemahaman Ahmadiyah hal yang demikian disebut dengan Chandah, yakni kegiatan menyisihkan beberapa harta. Jamaah Ahmadiiyah terus memberlangsungkan kegiatan membayar pengorbanan harta tersebut yang dilaksanakan tiap bulannya demi kemakmuran bersama dalam jamaah.

[30] Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah*, 106.
[31] al-Qur'ān, 21: 107.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

KOMPARASI KONSEP KHILAFAH HTI DAN AHMADIYAH

A Analisis Kekuasaan Terhadap Konsep Khilafah HTI

Konsep *khilafah* sendiri lahir atas berbagai macam problematika yang sedang terjadi di dunia, juga disebabkan oleh maraknya perpecahan yang terjadi pada internal umat Islam itu sendiri. Konsep tersebut juga erat kaitannya dengan konteks pemerintahan atau pemimpin, sehingga berbagai macam hal nantinya akan diatur sesuai dengan syariat Islam. Konsep tersebut tentunya tidak bisa secara langsung diimplementasikan secara masif dan universal, pasti terdapat suatu fase penyesuaian kontek terlebih dahulu dengan berbagai macam sosio-kultural yang ada. Sebab konsep *khilafah* tersebut tidak senantiasa memiliki konotasi negatif, seperti yang disampaikan oleh Emha Ainun Nadjib bahwa *khilafah* bisa berupa demokrasi, monarki, kekaisaran, dan lain sebagainya dengan berpedoman pada aspek keislaman.

Akan tetapi, konsep *khilafah* dalam konteks pemikiran HTI ini merujuk pada sistem pemerintahan masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dimana kemurnian Islam masih terjaga dengan hadirnya para sahabat yang mendapatkan ilmu perihal keislaman langsung dari Nabi Muhammad SAW sebelum wafat. Selain itu, ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits yang sudah ada juga pada dasarnya berdasarkan pada konteks masa tersebut, sehingga penerapan dari *khilafah* masih sangat sesuai jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diimplementasikan pada masa tersebut yang memang merupakan masa-masa keemasan Islam.

Menurut pandangan arkeologi Foucault bahwa konsep *khilafah* tersebut merupakan kekangan dari masa lalu yang seharusnya tidak boleh terjadi, sebab munculnya suatu entitas yang absolut harus dihindari dan dihilangkan. Sebagai contoh adalah HTI menganggap bahwa kesempurnaan Islam berdasarkan dari tegaknya *khilafah*.[1] Konsep *khilafah* yang diusung oleh HTI memiliki tiga landasan utama terkait pentingnya penerapan konsep tersebut, yakni landasan filosofis, historis dan normatif. Berdasarkan latar belakang tersebut yang membuat bahwa konsep tersebut dianggap final dan sangat dibutuhkan. Focault berpandangan bahwa konsep atau wacana tersebut dianggap sebagai suatu hal yang tidak siap pakai. Lebih lanjut lagi bahwa harus ada suatu pengujian secara mendalam terkait konsep tersebut, yang menandakan bahwa konsep tersebut bukanlah suatu hal yang final, karena berbagai macam konsep yang muncul atau dicetuskan oleh manusia senantiasa mengalami perkembangan.

Pengelompokan berbagai statemen dalam suatu bentuk diskursus tertentu oleh Foucault disebut sebagai *enunciative modalities* –regulasi hukum pembentuk statemen-. Pada regulasi tersebut terdapat suatu subjek yang memiliki hak dimana pada konteks konsep khilafah HTI ini adalah ketua dari ormas HTI. Selain itu terdapat pula zona munculnya statemen

[1] Syaiful Arif, "Pandangan dan Perjuangan Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia", *Aspirasi*, Vol. 7, No. 1, (2016), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, yakni organisasi keagamaan. Berdasarkan beberapa paparan di atas, menurut pandangan Foucault tidak dibenarkan sebab seorang subjek tidak bisa dijadikan suatu pokok idealisme –kesadaran kolektif-.[2]

Gagasan terkait *khilafah* tersebut jika dianalisa dengan beberapa konsep, seperti positivitas maka dapat diketahui jika menurut para petinggi dari HTI tersebut terdapat suatu kemunduran pada Islam, jika dibandingjan dengan pada masa keemasan yang diaraih pada saat menggunakan sistem *khilafah* pada masa lampau. Umat Islam dewasa ini seperti terpecah yang membuatnya mampu dikuasai oleh Barat dalam berbagai macam aspek, seperti ekonomi, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut para petinggi HTI tersebut menganggap bahwa kembali menggunakan sistem pemerintahan *khilafah* merupakan suatu keharusan dengan beracuan pada masa keemasan silam.

Analisa yang selanjutnya adalah dengan konsep *apriori historis* yang dimaksudkan bahwa pada diskursus *khilafah* tersebut tentunya terdapat semacam aturan maupun syarat-syarat tertentu agar bisa terwujud. Aturan maupun syarat tersebut tidak lain adalah syariat Islam dalam paradigma HTI itu sendiri yang di dalamnya terdapat suatu sistem pemikiran atau *episteme*, dan *episteme* tersebut yang akan mengimplementasikan suatu diskursus –konsep *khilafah*-. Hasil akhir dari *apriori historis* tersebut nantinya adalah suatu *arsip*, dimana *arsip* tersebut bukanlah suatu dokumen, namun lebih kepada bagaimana diskursus

[2] Listiono Santoso, dkk. *Epistemologi Kiri* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut diimplementasi dalam ruang lingkup tertentu. Jadi, munculnya suatu diskursus atau konsep *khilafah* tersebut secara tidak langsung terbentuk dari ketiga aspek tersebut.

Pembahasan di atas merupakan analisis dari arkeologi Foucault, dimana kajiannya terdapat pada suatu regulasi yang membentuk suatu diskursus –pada tahap ini konsep kekuasaan sudah muncul, namun tidak terlalu jelas-. Sementara itu pada pembahasan selanjutnya adalah perihal genealogi dalam pandangan Foucault, dimana genealogi sendiri ingin menunjukkan secara jelas suatu kuasa tersebut. Pada genealogi juga berbagai macam bentuk kehadiran yang disebabkan oleh sejarah masa lalu dihilangkan, sebab terdapat "ego" atau kesadaran masa lalu yang berpotensi menyamarkan fakta yang sesungguhnya dari sejarah. Kuasa tersebut dapat mengobjektifikasi subjek tanpa disadari oleh subjek tersebut, serta genealogi membicarakan sejarah atas kehendak-kehendak berkuasa yang saling berjuang berhadapan.[3]

Pada konteks HTI sendiri terdapat suatu relasi antara sistem kepengurusan, madzhab maupun paradigma pemikiran, dimana hal tersebut bertujuan untuk membentuk subjek agar memiliki kesamaan dengan diskursus *khilafah*. Praktek kuasa yang membentuk diskursus *khilafah* tersebut nantinya akan membuat suatu pendisiplinan para anggota maupun calon anggota HTI yang memiliki beranekaragam latar belakang –sosial dan budaya- tersebut menjadi kader yang puritan.

[3] *Ibid.*, 178.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam upaya menghasilkan suatu anggota yang dinginkan dengan paradigma khas HTI tersebut tentunya terdapat beberapa mekanisme yang harus dilaksanakan. Mekanisme atau yang disebut Foucault sebagai pendisiplinan tubuh tersebut nantinya akan terjadi pada proses internal dalam organisasi HTI yang juga berperan sebagai mesin produksi kekuasaan dan pengetahuan dalam membentuk subjek –para anggota- menuju orientasi yang lebih produktif-.

Berbagai macam usaha tentunya sudah dilakukan oleh kelompok HTI tersebut dalam upayanya untuk mengaktualisasi konsep pemerintahan *khilafah* tersebut, sekaligus juga membentuk suatu anggota yang militan. Upaya yang dilakukan tersebut secara tidak langsung merupakan suatu bentuk kuasa atas tubuh yang menurut Foucault adalah seni dalam pendisiplinan tubuh –tubuh merupakan suatu media terhadap kuasa-, sehingga tunduk dengan tujuan tubuh dapat diubah dan disempurnakan.[4]

Praktek dari pendisiplinan tubuh tersebut sendiri pada dasarnya dilaksanakan pada suatu ruang lingkup yang tertutup, seperti pada suatu institusi yang memiliki aturan-aturan yang ketat –sekolah, penjara, rumah sakit, organisasi, dan lain sebagainya-. Pada konteks suatu institusi organisasi, disiplin tubuh ini dapat dilihat pada suatu sistem dan regulasi baik secara makro maupun mikro yang dalam hal ini dicontohkan dengan cara berpakaian maupun karakteristik visual dari para anggota HTI tersebut,

[4] P. Benny Setiawan, "Praktik Disiplin dalam Pendidikan di Seminari Menengah", *Retorika: Jurnal Ilmu Humaniora Baru*, Vol. 04, No. 01 (2015), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana para perempuan dianjurkan untuk berpakaian tertutup –memakai niqab-, sedangkan bagi laki-laki dianjurkan menggunakan celana cingkrang –di atas mata kaki-, jenggot panjang dan terdapat tanda hitam di jidat bagi laki-laki. Beberapa karakteristik tersebut sendiri berdasarkan pemahaman mereka terkait sunnah agar bisa meniru karakteristik visual dari Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari implementasi tersebut sendiri tentunya sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa cara beragama mereka yang paling benar dengan sesuai pada sunnah.

Karakteristik yang dibangun oleh seluruh anggota HTI tersebut tentunya merupakan suatu normalisasi –dalam bahasa Foucault- yang dapat dipatuhi dan diikuti, antar anggota tersebut saling menjalin relasi –baik antara ketua dengan jajarannya, maupun sebaliknya-. Apabila relasi yang terjalin tersebut berjalan sesuai dengan keinginan, maka tubuh akan lebih mudah dan dapat dikendalikan secara maksimal tanpa disadari.[5]

Pendekatan yang dilakukan HTI dalam menyebarkan diskursus *khilafah* tersebut diantaranya adalah dengan cara dakwah. Dakwah tersebut sendiri dilakukan pada berbagai macam aspek baik lembaga pendidikan maupun institusi pemerintahan, seperti pesantren, universitas maupun dalam bentuk pengajian-pengajian kecil lainnya.[6] Dakwah atau seruan yang dilontarkan oleh HTI sendiri tidak hanya bersifat pendidikan –nasihat dan petunjuk-, namun lebih cenderung terhadap kegiatan politik yang dilakukan

[5] Sunu Hardiyanta, *Michel Foucault Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern* (Yogyakarta: LKiS, 2016), 25.
[6] Abi Chusna, "Konsep Jihad Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI): Studi Perbandingan" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara menyampaikan fikrah-fikrah Islam yang disertai dengan hukum-hukumnya agar bisa diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari tidak terkecuali sistem pemerintahan.[7]

Berbagai macam kegiatan pengajian, seminar maupun diskusi yang gencar dilakukan tersebut tentunya akan membuat tubuh semakin disiplin atau patuh terhadap wacana *khilafah* tersebut. Terlebih lagi dengan adanya konferensi yang dilakukan oleh HTI, sekaligus merupakan bentuk disiplin tubuh berskala makro yang didatangi oleh anggota HTI baik nasional maupun internasional. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya juga bertujuan untuk merekrut anggota baru agar kelompok tersebut semakin besar dan memiliki eksistensi yang tidak kalah dengan kelompok lain.[8]

Selain melalui metode kontrol aktifitas, pendisiplinan tubuh oleh HTI tersebut juga menggunakan seni penyebaran, dimana metode tersebut dilakukan dengan melakukan penyebaran serta terdapat suatu pembatas antara individu dengan individu lainnya yang berpotensi merusak suatu regulasi kuasa yang sudah terbentuk. Pada konteks HTI ini seni penyebaran tersebut dilakukan dengan membatasi para anggota baru yang masih memiliki loyalitas rendah untuk tidak berinteraksi dengan individu lain yang memiliki paradigma pemikiran berbeda dengan mereka, sehingga diskursus *khilafah* tersebut tetap melekat pada diri anggota HTI. Seni penyebaran lain ketika diskursus tersebut sudah terelaisasi adalah dengan membatasi diri

[7] Fitrina Hasanah, "Peranan Hizbut Tahtir Indonesia (HTI) Sebagai Organisasi Islam Non-Partisan: Dalam Perspektif Khilafah" (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 34.
[8] Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat Islam agar tidak bersinggungan dengan negara lain yang memiliki orientasi agama berbeda. Juga berbagai macam hal nantinya akan berpedoman pada al-Qur'an dan sunnah, sehingga segala sesuatu yang tidak terdapat pada kedua sumber rujukan utama Islam tersebut akan dihilangkan.

B Analisis Kekuasaan Terhadap Konsep Khilafah Ahmadiyah

konsep terkait *khilafah* memang tidak bisa dilepaskan pada aspek pemimpin atau *khalifah* yang berfungsi sebagai pengganti berbagai macam aspek kehidupan umat manusia. Begitupula dengan pelopor dari Ahmadiyah, Ghulam Ahmad yang beranggapan bahwa terdapat suatu tanggung jawab moral untuk menginterpretasikan nilai-nilai keislaman sesuai dengan sosio-kultural yang sedang dihadapi. Konsep *khilafah* yang digagas oleh Ahmadiyah sendiri berbeda dengan HTI yang lebih cenderung mengarah pada politik maupun sistem pemerintahan. *Khilafah* Ahmadiyah cenderung mengarah pada aspek spiritualitas atau tasawuf.[9]

Latar belakang dari konsep *khilafah* Ahmadiyah disandarkan pada ayat al-Qur'an surat an-Nur ayat 55 yang memiliki arti sebagai berikut:[10]

> *"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sunguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku, dan barangsiapa*

[9] Muhammad Muhtador, "Doktrin Kenabian Ahmadiyah Perspektif Teologis dan Analisis Sejarah Kemunculan", *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam,* Vol. 4, No. 2 (2021), 78.
[10] Muhammad Muhtador, "Khilafah Islamiyah Perspektif Ahmadiyah: Sebuah Gerakan Spiritual Keagamaan", *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf,* Vol. 02, No. 01 (2016), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik".

Berdasarkan ayat tersebut Ahmadiyah berpendapat bahwa konsep *khilafah* harus senantiasa ditehakkan untuk menggantikan posisi Nabi Muhammad sebagai penerus ajaran agama, sebab *khalifah* juga berperan sebagai bayang-bayang dari nabi yang juga mengemban misi kenabian agar tetap berlangsung sampai hari kiamat. Hal tersebut bisa terjadi karena Ahmadiyah menganggap bahwa wahyu tidak hanya diturunkan pada nabi maupun utusan-Nya saja, namun juga kepada semua umat manusia –Ahmadiyah tidak membedakan antara ilham dengan wahyu-.[11]

Fungsi dari *khilafah* menurut Ahmadiyah sendiri berdasarkan pada surat an-Nur ayat 56, yakni sebagai suatu metode untuk menjaga kekuatan agama, sumber ketenangan dan sebagai sumber pengabdian. Berdasarkan hal tersebut, ketaatan dan kepercayaan terhadap seorang *khalifah* memiliki otoritas mutlak yang tidak bisa ditolak dan harus dilaksanakan.[12] Diskursus tersebut tentunya tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang absolute jika berpijakan pada konsep arkeologi Foucault, sebab akan tidak relevan jika diterapkan secara terus menerus pada suatu konteks yang berbeda.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa diskursus tersebut didasarkan pada statemen dari *khalifah* pertama yang sekaligus juga pendiri dari kelompok Ahmadiyah tersebut, yakni Ghulam Ahmad. Ruang lingkup dari munculnya statemen tersebut tidak lain adalah organisasi atau

[11] Ahmad Hudori, "Khilafah Islamiyah Perspektif Ahmadiyah" (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 44-45.
[12] Muhtador, *Khilafah Islamiyah*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok Ahmadiyah itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka bisa dianggap jika statemen yang berasal dari Ghulam Ahmad tersebut menjadi suatu idealisme atau kesadaran kolektif yang dimiliki oleh kelompok Ahmadiyah. Sedangkan seharusnya seorang subjek atau individu tidak dibenarkan untuk menjadi suatu kesadaran kolektif yang nantinya akan membuat suatu pengendapan dalam proses pengetahuan.[13]

Secara positivistik latar belakang munculnya diskursus tersebut adalah dengan banyaknya fenomena dewasa ini yang dianggap mulai menyimpang –baik dari akidah, ibadah maupun akhlak-. Selain itu juga sistem ekonomi yang dirasa tidak sesuai dengan aspek-aspek keislaman, dimana masih terdapat indikasi riba dalam sistem ekonomi yang sedang berjalan saat ini. Oleh sebab itu, tujuan dari diskursus *khilafah* yang digagas oleh Ahmadiyah diantaranya adalah untuk memberbaiki akidah, ibadah serta akhlak umat muslim. Selain itu juga menerapkan konsep sistem ekonomi Islam secara menyeluruh, serta membentuk suatu kelompok muslim agar bisa bersaing dalam skala global dengan menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan dengan berpedoman pada Islam sebagai sumber ilmu dunia.[14]

Secara *apriori historis* diskursus *khilafah* yang digagas oleh Ahmadiyah tersebut tentunya memiliki suatu syarat dan ketentuannya yang hampir sama dengan diskursus *khilafah* dari HTI, yakni berdasarkan syariat

[13] Santoso, *Epistemologi Kiri*, 175.
[14] Muhtador, *Khilafah Islamiyah*, 85-86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam yang terdapat pada al-Qur'an dan sunnah yang sesuai dengan paradigma dari Ahmadiyah. Suatu *episteme* yang terdapat pada *arsip* tersebut kemudian nampak pada implementasi dari tindakan atau corak beragama Ahmadiyah terkait diskursus *khilafah* tersebut. Regulasi antara ketua Ahmadiyah dengan pengetahuannya terkait diskursus *khilafah* tersebut yang kemudian terdapat kuasa di dalamnya, akan tetapi hal tersebut tidak terlihat secara jelas. Upaya memperjelas kuasa yang terdapat pada regulasi tersebut yang kemudian disebut Foucault dengan genealogi.

Pada geneaologi sendiri disadari bahwa terdapat suatu "ego" yang berpotensi untuk menyamarkan suatu kebenaran dari fenomena yang pernah terjadi pada masa lalu, dimana pada konteks ini sendiri adalah terdapat penurunan terhadap nilai-nilai spiritualitas Islam pada saat konsep *khilafah* tersebut diimplementasikan. Penurunan tersebut bisa dilihat pada saat seorang *khalifah* yang terjadi pada masa Umar bin Khattab dan Usman bin Affan yang meninggal dunia sebab dibunuh oleh seorang munafik.[15] Selain itu juga terdapat fenomena terpecahnya umat Islam menjadi dua golongan, yakni Syiah dan Mu'tazilah sehingga menyebabkan terbunuhnya Hasan dan Husein, serta kemerosotan yang dialami oleh umat Islam pada masa bani Umayyah yang disebabkan kurang berkembangnya intelektual muslim pada masa tersebut.

[15] Ali Muhammad Ash-shalabi, *Biografi Utsman bin Affan*, Terj. Masturi Irham dan Malik Supar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kuasa yang terjadi pada diskursus *khilafah* tersebut tanpa disadari bisa mengobjektifikasi subjek, dimana pada konteks Ahmadiyah ini sendiri terdapat berbagai relasi yang bisa menimbulkan kuasa, seperti sistem keanggotaan atau kepengurusan, juga paradigma pemikiran. Beberapa aspek tersebut nantinya yang akan membentuk subjek agar memiliki kesamaan dengan diskursus *khilafah* Ahmadiyah. Pembentukan subjek tersebut dilakukan dengan pendisiplinan tubuh para anggota Ahmadiyah tersebut, sehingga menghasilkan suatu anggota yang bernilai produktif bagi suatu relasi kuasa maupun diskursus *khilafah*.

Pendisiplinan tubuh yang dilakukan oleh Ahmadiyah tentunya memiliki suatu mekanisme tertentu yang harus dilakukan, dan mekanisme tersebut terjadi pada proses internal yang terdapat pada Ahmadiyah. Hasil dari mekanisme yang telah dilakukan tersebut nantinya berupa mesin produksi kekuasaan dan pengetahuan yang baru dalam bentuk subjek –para anggota-, dimana para subjek tersebut memiliki orientasi untuk lebih produktif dalam menjalankan diskursus *khilafah* Ahmadiyah. Jemaah Ahmadiyah yang berperan sebagai ruang lingkup tertutup dalam praktek pendisiplinan tubuh tentu memiliki aturan maupun agenda yang harus dilaksanakan oleh subjek, seperti adanya suatu baiat terhadap anggota baru yang mau bergabung dalam organisasi tersebut, serta perintah dari *khalifah* adalah suatu hal yang wajib ditaati. Selain itu juga terdapat *Chanda* yang merupakan suatu bentuk pengorbanan ketika seorang individu mau bergabung dalam jemaah Ahmadiyah. Agenda lainnya adalah donor darah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja bakti, serta kegiatan pemberdayaan perempuan –pelatihan keterampilan-, dan lain sebagainya.[16]

Berbagai macam agenda maupun aturan yang dilaksanakan oleh jemaah Ahmadiyah tersebut merupakan suatu bentuk kontrol aktifitas yang dapat dipatuhi dan diikuti oleh para anggotanya. Relasi yang terjadi pada jemaah Ahmadiyah nantinya yang akan membuat suatu praktek kuasa pada organisasi tersebut, sehingga membuat tubuh lebih mudah dikendalikan secara tidak langsung, terlebih lagi dengan hegemoni yang terdapat di dalamnya sebab harus patuh terhadap perintah dari *khalifah*.

Sementara itu, seni penyebaran yang dilakukan Ahmadiyah dalam upayanya untuk memberikan batasan terhadap jemaahnya agar tidak merusak regulasi atau relasi kuasa yang sudah terbentuk tersebut menjadi rusak. Sebagai contoh dari seni penyebaran tersebut adalah terdapatnya dua sekte dalam organisasi Ahmadiyah tersebut, yakni *Qodian* dan *Lahore*. Antara kedua sekte tersebut terdapat perbedaan terkait kenabian, dimana Ahmadiyah *Qodian* menganggap bahwa Ghulam Ahmad adalah seorang nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, Ahmadiyah *Lahore* menganggap bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, sedangkan Ghulam Ahmadiyah merupakan seorang *mujaddid* atau pembaharu dalam dunia muslim seperti halnya Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan lain-lain.[17] Selain itu, organisasi Ahmadiyah bersifat ekslusif

[16] Muhtador, *Khilafah Islamiyah*, 90-91.
[17] Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2005), 76-79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam berdialog, beribadah, beraktivitas, serta dalam hal sosial –seperti pernikahan sesama anggota-. Hal tersebut dilakukan Ahmadiyah agar ideologis yang sudah dibangun oleh Ghulam Ahmad tidak terkontaminasi oleh paradigma pemikiran yang lain.

C Komparasi Kuasa Konsep Khilafah HTI dan Ahmadiyah

Berdasarkan analisis terkait kuasa terhadap konsep khilafah yang dilayangkan oleh HTI dan Ahmadiyah pada sub-bab sebelumnya, maka selanjutnya adalah membandingkan hasil analisis tersebut agar bisa memahami terkait konsep dari kedua kelompok tersebut, berikut tabel komparasi dari konsep tersebut:

No.	Kuasa Khilafah HTI	Kuasa Khilafah Ahmadiyah
1.	Dilatarbelakangi oleh kekangan masa keemasan Islam yang menerapkan khilafah.	Dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa Ghulam Ahmad merupakan seorang nabi atau al-Masih.
2.	Pokok idealisme terdapat pada ketua organisasi.	Pokok idealisme terdapat pada pendiri organisasi atau khalifah pertama.
3.	Relasi kuasa terdiri antara sistem kepengurusan, madzhab dan paradigma pemikiran.	Relasi kuasa terdiri antara khalifah dan idealismenya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.	Kuasa tubuh dilakukan dengan cara menyamaikan karakteristik visual para anggota.	Kuasa tubuh dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti baiat, *chanda* dan agenda sosial lainnya.
5.	Seni penyebaran yang dilakukan dengan membatasi para anggotanya dari konsep ideologi yang berbeda.	Seni penyebaran yang dilakukan dengan cara membagi kelompok Ahmadiyah menjadi dua kelompok agar prinsipnya tidak tercampur.

Berdasarkan komparasi di atas, maka dapat dipahami jika kedua kelompok tersebut memiliki beberapa perbedaan menurut konsep kuasa Foucault. Terlebih lagi pada kuasa tubuh dari para anggotanya, dimana kelompok HTI menerapkan pendisiplinan tubuh dengan cara menyelaraskan karakteristik visualnya. Sementara itu, kelompok Ahmadiyah lebih cenderung kepada berbagai macam tradisi kelompok. Seni penyebaran yang dilakukan sendiri oleh HTI dengan cara membatasi para anggotanya terhadap ideologi di luar HTI. Sedangkan Ahmadiyah dilakukan dengan cara membagi dua kelompok agar prinsipnya tidak bercampur aduk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan penjalasn yang sudah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa kesimpulan yang akan diambil sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya. *Pertama,* konsep *khilafah* yang diusung oleh HTI sendiri cenderung pada aspek politik atau sistem pemerintahan dengan karakteristik menyatukan seluruh umat Islam tanpa melihat batasan negara, serta harus menerapkan syariat Islam dalam setiap hukumnya. Sementara itu, konsep *khilafah* Ahmadiyah cenderung pada aspek personal atau spiritualitas. Karakteristik dari *khilafah* Ahmadiyah diantaranya adalah mengenai nilai solidaritas, ketaatan terhadap *khalifah*, nilai perdamaian dan nilai sosial.

Kedua, berdasarkan analisis kuasa Michel Foucault terdapat relasi antara kuasa dan pengetahuan dalam konsep *khilafah* HTI maupun Ahmadiyah. Relasi antara kuasa dan pengetahuan tersebut terdapat pada paham keislaman mereka masing-masing terkait konsep *khilafah*. Secara arkeologi maupun genealogi terdapat beberapa perbedaan, dimana fokus dari HTI mengarah pada sistem pemerintahan dan Ahmadiyah pada aspek spiritualitas. Sedangkan pada kontrol aktivitas oleh HTI cenderung pada aspek lahiriah –cara berpakaian maupun karakteristik visual-, sementara itu pada Ahmadiyah kontrol aktivitas yang dilakukan cenderung pada aspek

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batiniah –perbaikan akhlak, akidah maupun ibadah-. Seni penyebarannya sendiri pada HTI terdapat pada aspek internal keagamaan, sedangkan Ahmadiyah lebih kepada aspek sosial.

B Saran

Berdasarkan penelitian terkait konsep *khilafah* pada organisasi HTI dan Ahmadiyah tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat diharapkan agar bisa lebih memahami karakteristik maupun esensi dari konsep *khilafah* yang digagas oleh HTI maupun Ahmadiyah, baik secara teori maupun implementasinya, agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman fungsi maupun menimbulkan problematika yang tidak diinginkan nantinya.
2. Adanya penelitian ini diharapkan mampu memunculkan suatu pengetahuan secara lebih luas serta mendalam pada generasi saat ini maupun yang akan datang.
3. Dengan diambilnya isu ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan dorongan dalam meneliti lebih lanjut terhadap konsep keagamaan tersebut dalam konteks dewasa ini agar pemahaman tersebut senantiasa berkembang dan mengalami stagnansi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Al-Amin, Ainur Rofiq. Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Indonesia. Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang. 2012.

al-Qur'ān.

An-Nabhani, Taqiyuddin. *As Syakhshiyah Al Islamiyah*. Beirut : Darul Ummah. 2003.

Arief. *Metode dan Epistemologi Estetika: Karya Esensial Faucault 1954.* Yogyakarta: Jalasutra. 2009.

Ash-Shalabi, Ali Muhammad. *Biografi Utsman bin Affan*. Terj. Masturi Irham dan Malik Supar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2013.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitiian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Bertens, K. *Sejarah Filsafat Kontemporer Prancis Jilid II*. Jakarta: Gramedia. 2003.

Chalipate, Early. *Khulafaur Rasyidin*. Terj. Maulana Muhammad Ali. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah. 2013.

Focault, Michel. *Power/Knowledge: Wacna Kuasa/Pengetahuan.* Yogyakarta: Bintang Budaya. 2002.

Foucault, Michel. *Arkeologi Pengetahuan.* Terj. Inyiak Ridwan Muzir. Yogyakarta: Ircisod. 2012

Foucault, Michel. *Kegilaan dan Peradaban.* Terj. Yudi Santoso. Yogyakarta: Pustaka Narasia. 2002.

Hadi, Sutrisno. *Metodollogi Research I.* Yogyakarta: Andi Offset. 2004.

Hardiyanta, Sunu. *Michel Foucault Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern.* Yogyakarta: LKiS. 2016.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.

John, Lechte. *50 Filsuf Kontemporer dari Strukturalisme Sampai Postmodernitas.* Terj. A. Gunawan Admiranto. Yogyakarta: Kanisius. 2001.

John, Lechte. *Pengetahuan dan Metode: Karya-Karya Penting Michel Foucault & Paul Robinow.* Terj. Arief. Yogyakarta: Jalasutra. 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kamaruzzaman. *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamentalis*. Malang: Indonesiatera. 2001.

Mahmud. *Metode Penelitiian Pendidikan.* Bandung: Pustaka Setia. 2011.

Poedjawijatna. *Tahu dan Pengetahuan: Pengantar ke Ilmu dan Filsafat*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

Ritzer, George. *Teori Sosial Postmodern.* Yogyakarta: Juxtapose. 2009.

Santoso, Listiono, dkk. *Epistemologi Kiri*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media. 2012.

Santoso, Listiyono. *Epistemologi Kiri.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2006.

Saufi, Ahkmad dan Hasmi Fadiillah. *Sejarah Peradaban Islam.* Yogyakarta: Deepublish. 2012.

Smart, Barry. *Michel Foucault*. New York: Routledge. 2002.

Tahrir, Hizbut. *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. 2000.

Zulkarnain, Iskandar. *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS. 2005.

Jurnal

Afandi, Abdullah Khozin. "Konsep Kekuasaan Michel Foucault". *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam.* Vol. 02. No. 01. 2012.

Alam, Fahrul. "Hegemoni Barat Terhadap Kebudayaan Islam: Menguak Paham Orientalis Esward W. Said". Pada International Conference On Syariah & Law. 2021.

Arif, Syaiful. "Pandangan dan Perjuangan Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia". *Aspirasi*. Vol. 07. No. 01. 2016.

Fitriono, Eko Nani dan Suhono. "Wacana Negara Islam: Kajian Kritis Konstruksi Pemikiran Khilafah ala Hizbut Tahrir". *Ri'ayah.* Vol. 02. No. 01. 2017.

Kamahi, Umar. "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik". *Jurnal al-Khitabah.* Vol.03. No. 01. 2017.

Mudhoffir, Abdil Mughis. "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik". *Jurnal Sosiologi Masyarakat.* Vol. 18. No. 01. 2013.

Muhtador, Muhammad. "Doktrin Kenabian Ahmadiyah Perspektif Teologis dan Analisis Sejarah Kemunculan". *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*. Vol. 04. No. 02. 2021. 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhtador, Muhammad. “Khilafah Islamiyah Perspektif Ahmadiyah: Sebuah Gerakan Spiritual Keagamaan”. *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf.* Vol. 02. No. 01. 2016.

Muhtador, Muhammad. “Khilafah Islamiyah Perspektif Ahmadiyah: Sebuah Gerakan Spiritual Keagamaan”. *Esoterik*: *Jurnal Akhlak dan Tasawuf.* Vol. 02. No. 01. 2016.

Setiawan, P. Benny. “Praktik Disiplin dalam Pendidikan di Seminari Menengah”. *Retorika: Jurnal Ilmu Humaniora Baru.* Vol. 04. No. 01. 2015.

Zainudin, Ely. ”Peradaban Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin”. *Jurnal Intelegensia*. Vol. 03. No.1. 2015.

Skripsi

Chusna, Abi. “Konsep Jihad Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI): Studi Perbandingan”. Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014.

Firdaus, Moh. Fiqih. “Memaknai Paradigma Integrasi Twin Towers UINSA: Studi Kritis dalam Pandangan Michel Foucault”. Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018.

Hasanah, Fitrina. “Peranan Hizbut Tahtir Indonesia (HTI) Sebagai Organisasi Islam Non-Partisan: Dalam Perspektif Khilafah”. Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016.

Hudori, Ahmad Hudori. “Khilafah Islamiyah Perspektif Ahmadiyah”. Skripsi—Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2009.

Kurniawati, Etiek Dwi. “*Khilafah* Islam Versus Pancasila: Studi Tentang Perdebatan Ideologi di Kalangan Generasi Milenial Melalui Media Sosial”. Skripsi—Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel. 2019.

Mudzakkir. “Tubuh dan Kekuasaan: Telaah Pemikiran Michel Foucault”. Skripsi—UIN Sunan Kalijaga. 2006.

Rodliyah, Siti. “Study Analisis Genealogis Michel Foucault Terhadap Narasi Amin Rais Tentang Pemilu Presiden”. Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.

Saputri, Citra Ageng. “Konsep Khilafah Dalam Pandangan Taqiyuddin an-Nabhani dan Abdurahman Wahid”. Skripsi—Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. 2020.

Internet

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mustofa, Helmi. "*Khilafah* Alamiah dan *Khilafah* dalam Batas Kemampuan". https://www.caknun.com/2017/khilafah-alamiah-dan-khilafah-dalam-batas-kemampuan/. Pada 28 Februari 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id